

Laporan Koordinasi Penyusunan RKP 2024

DIREKTORAT AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
2023

LAPORAN

KOORDINASI PENYUSUNAN RKP 2024 BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENANGGUNG JAWAB

AMICH ALHUMAMI, M.A, M.Ed, PH.D
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN,
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DITERBITKAN OLEH

DIREKTORAT AGAMA,
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN BAPPENAS

KETUA

DIDIK DARMANTO, S.Sos, MPA
DIREKTUR AGAMA, PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ANGGOTA / PENYUSUN

SUPRAPTO BUDINUGROHO, ST, M.Eng;
SULARSONO, SP, ME;
CEP KIKI KUSUMAH, S.Si., MA;
ZAKY MAS'UL, S.Sos, MSP, MA;
RISKY FIRMANSYAH, SE;
ATISOMYA NARESWARI, SE;
ULIA BALQIS, S.Pd;
EMHAKA YUDHISTIRA, S.Si;
MUHAMMAD NASHIRUDDIN, S.Pd;
Ir. BAMBANG TRIYONO.

EDITOR

SHAFIRA LELIANA PUTRI, ST.

CETAKAN

PERTAMA, 2023

DIREKTORAT AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2023



Kata Pengantar

Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan salah satu tujuan pembangunan pada dokumen Indonesia 2045. Maka, pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan sangat penting untuk direncanakan secara baik dan menyeluruh, baik dalam penyusunan kebijakan maupun dalam penganggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan melakukan fungsi koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah bidang Agama, pendidikan dan kebudayaan tahun perencanaan dan tahun anggaran 2024 sepanjang tahun 2023.

Di dalam buku ini secara sistematis akan memaparkan serangkaian kegiatan koordinasi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah dengan berbagai mitra sampai dengan kesimpulan dan saran yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah membantu penyelesaian laporan ini dan berbagai pihak lainnya.

Jakarta, 31 Desember 2022

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas

Daftar Isi

LAPORAN	i
1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUJUAN	3
1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN	3
1.4 METODOLOGI	4
1.5 KELUARAN KEGIATAN	5
2 CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6
2.1 CAPAIAN BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7
2.1.1 CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN	7
2.1.2 CAPAIAN BIDANG AGAMA	8
2.1.3 CAPAIAN BIDANG KEBUDAYAAN	9
2.2 ARAH KEBIJAKAN	10
2.2.1 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	10
2.2.2 ARAH KEBIJAKAN BIDANG AGAMA	11
2.2.3 ARAH KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN	12
3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024	13
3.1 PRIORITAS NASIONAL MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING RKP 2024 BIDANG PENDIDIKAN	15
3.1.1 PP 4 - Program Prioritas Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	16
KP 1. Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	17
KP 2. Kegiatan Prioritas Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	18
KP 3. Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20
KP 4. Kegiatan Prioritas Penjaminan Mutu Pendidikan	22
KP 5. Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	24
3.1.2 PP 7 – Program Prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	25
3.2 PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN RKP 2024 BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN	26
3.2.1 PP 3 – Program Prioritas Moderasi Beragama Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	26
KP 1. Kegiatan Prioritas Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	28
KP 2. Kegiatan Prioritas Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	29
KP 3. Kegiatan Prioritas Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	30
KP 4. Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	31
KP 5. Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	31

3.2.2	PP 2 – Program Prioritas Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	35
KP 1.	Kegiatan Prioritas Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	36
KP 2.	Kegiatan Prioritas Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	37
KP 3.	Kegiatan Prioritas Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	38
KP 4.	Kegiatan Prioritas Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	38
KP 5.	Kegiatan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	39
3.3	PENYUSUNAN MAJOR PROJECT RKP 2024	40
3.4	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	42
3.5	SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023	44
3.5.1	Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2024	48
A.	Pagu Indikatif Kemendikbudristekristek 2024	48
B.	Usulan Tambahan	49
C.	Pagu Anggaran Kemendikbudristek 2024	51
D.	Pagu Alokasi Kemendikbudristek 2024	51
E.	Perubahan SOTK	Error! Bookmark not defined.
3.5.2	Perencanaan dan Penganggaran KEMENTERIAN AGAMA Tahun Anggaran 2023	55
A.	Pagu Indikatif Kemenag 2024	57
B.	Usulan Tambahan	59
C.	Pagu Anggaran Kemenag 2024	60
D.	Pagu Alokasi Kemenag 2024	60
E.	Pending Issues	60
3.5.3	Perencanaan dan Penganggaran Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2023	63
A.	Pagu Indikatif Perpusnas 2024	63
B.	Usulan Tambahan	64
C.	Pagu Anggaran Perpusnas 2024	64
D.	Pagu Alokasi Perpusnas 2024	Error! Bookmark not defined.
3.6	Pemutakhiran RKP 2024	65
4	PENUTUP	67
4.1	KESIMPULAN	68
4.2	SARAN	68
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN.....	8
TABEL 2.2	CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA	9
TABEL 2.3	CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN	9
TABEL 3.1	SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET PN 3 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	15
TABEL 3.2	SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PN 3	16
TABEL 3.3	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENINGKATAN KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.....	18
TABEL 3.4	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP AFIRMASI AKSES DAN PERCEPATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN	20
TABEL 3.5	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENEMPATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	21
TABEL 3.6	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	24
TABEL 3.7	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENINGKATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN ...	25
TABEL 3.8	SASARAN DAN INDIKATOR PP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	25
TABEL 3.9	RINCIAN KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS MODERASI BERAGAMA MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL.....	27
TABEL 3.10	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENGUATAN CARA PANDANG, SIKAP, DAN PRAKTIK BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF JALAN TENGAH.....	29
TABEL 3.11	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENGUATAN HARMONI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	29
TABEL 3.12	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENYELARASAN RELASI AGAMA DAN BUDAYA	30
TABEL 3.13	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	31
TABEL 3.14	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA KEAGAMAAN	31
TABEL 3.15	33	
TABEL 3.16	SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET PP MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN	35
TABEL 3.17	SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KP REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL	36

TABEL 3.18	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN BUDAYA.....	37
TABEL 3.19	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PELINDUNGAN HAK KEBUDAYAAN & EKSPRESI BUDAYA.....	38
TABEL 3.20	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENGEMBANGAN DIPLOMASI BUDAYA	39
TABEL 3.21	SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	39
TABEL 3.22	DUKUNGAN SEKTOR AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP MAJOR PROJECT.....	41
TABEL 3.23	RINCIAN ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TA 2024 PER PROGRAM PER TAHAP PENGANGGARAN	52
TABEL 3.24	RINCIAN ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TA 2024 PER PROGRAM PER TAHAP PENGANGGARAN	52
TABEL 3.25	RINCIAN ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TA 2024 PER PROGRAM PER UNIT UTAMA PADA MASING-MASING TAHAP PENGANGGARAN	53
TABEL 3.26	60	
TABEL 3.27	RINCIAN ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TA 2024 PER PROGRAM PER UNIT UTAMA PADA MASING-MASING TAHAP PENGANGGARAN	61
TABEL 3.28	ALOKASI ANGGARAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TA 2024	64

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 TEMA, SASARAN DAN INDIKATOR RKP 2024	14
GAMBAR 3.2 BAGAN PRIORITAS NASIONAL MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	15
GAMBAR 3.3 MEKANISME PERTEMUAN TIGA PIHAK SESUAI PP17/2017	45
GAMBAR 3.4 ALUR SINKRONISASI RKP DENGAN RENJA K/L	45
GAMBAR 3.5 PERAN RENJA K/L DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	46
GAMBAR 3.6 STRUKTUR RENJA K/L MELALUI APLIKASI KRISNA RENJA	47
GAMBAR 3.7 TREN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024.....	55
GAMBAR 3.8 TREN ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TA 2020-2024	55
GAMBAR 3.9 PROPORSI BELANJA KEMENTERIAN AGAMA TA 2024.....	58
GAMBAR 3.10 TIMELINE PEMUTAKHIRAN RKP 2024	65



I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan memiliki peran penting di dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Di dalam prosesnya, perencanaan pembangunan harus mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pasal 20 ayat 1, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) setiap tahun.

Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan RKP sesuai dengan PP No. 17 tahun 2017 adalah (i) menyusun Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan penetapan lokasi dan keluaran (output), berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi lainnya, (ii) mengoordinasikan usulan rencana dan pendanaan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Lokasi, dan Keluaran (Output) kementerian/lembaga dan instansi lainnya, (iii) mengintegrasikan pemanfaatan belanja kementerian/lembaga, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Untuk melaksanakan peran tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dokumen RKP tersebut juga harus dapat menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam satu tahun.

Dalam tahapannya, penyusunan RKP oleh Bappenas setiap tahunnya akan melibatkan Kementerian/Lembaga dalam penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk memastikan keserasian antara program dan kegiatan; keserasian antara program lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai K/L; hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan K/L.

Koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan kesesuaian antara muatan RKP secara nasional, yang tercantum dalam dokumen RKP, dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga, yang tercantum dalam dokumen Renja K/L. Dengan demikian, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan akan dapat mencapai sasaran yang diharapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Fungsi koordinasi memiliki peran strategis dalam penyiapan produk perencanaan dan penganggaran sehingga dapat digunakan sebagai alat kendali atas kegiatan prioritas dan non prioritas.

Sesuai dengan konsep unified budget, alokasi anggaran di suatu Kementerian/ Lembaga dapat berasal dari berbagai sumber pendanaan, yaitu: Rupiah Murni (RM); PNB/BLU; Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) maupun Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN); dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berbagai sumber pendanaan tersebut harus dimobilisasi sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang paling optimal dan tidak terjadi tumpang tindih antar sumber pendanaan yang menyebabkan tingginya inefisiensi pemanfaatan anggaran. Khusus untuk sektor pendidikan, dimana total anggaran pendidikan diatur minimal sebesar 20 persen dari total belanja negara, proporsi anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer daerah lebih dari 50 persen sehingga sinergi pelaksanaan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui dana transfer daerah juga perlu ditingkatkan.

Dalam prosesnya, Bappenas juga menyelenggarakan Musrenbang Nasional Tahunan dalam rangka membahas penyempurnaan rancangan RKP dan melakukan sinkronisasi rancangan RKP dengan rancangan RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang Nasional diikuti oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi. Hasil dari Musrenbang Tahunan Nasional akan disempurnakan menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah yang kemudian ditetapkan oleh Presiden RI.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 melaksanakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada dokumen Narasi RKP 2024 hingga Lampiran Matriks Pembangunan dan Major Project.

1.2 TUJUAN

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan umum koordinasi terpadu ini adalah untuk: (1) mengkoordinasikan penyelenggaraan diskusi, konsultasi, komunikasi publik, dan sosialisasi penyusunan rencana pembangunan nasional pada lingkup agama, pendidikan dan kebudayaan, serta (2) menyelenggarakan diskusi, pertemuan, pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan RKP 2024;
2. Tujuan khusus koordinasi terpadu ini adalah (1) merumuskan arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan indikator capaian pembangunan nasional bidang agama, pendidikan dan kebudayaan (2) melaksanakan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional bidang agama, pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, (3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pendanaan Prioritas Nasional baik melalui Rupiah Murni, SBSN, PNBPN, BLU, PHDN dan PHLN, serta (4) menyusun RKP 2024 Bidang Agama, Pendidikan dan kebudayaan.

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sesuai amanat PP No. 17 Tahun 2017, tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah: (i) penyusunan tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan; (ii) tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga; (iii) penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran; (iv) penyiapan rancangan awal RKP; (v) penyusunan pagu indikatif; (vi) koordinasi penyusunan rancangan awal RKP; (vii) penetapan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/ lembaga. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengacu pada RPJMN 2020-2024.

Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah bidang agama, pendidikan dan kebudayaan selama tahun 2022 antara lain koordinasi penyusunan RKP 2024 lingkup Agama, Pendidikan dan Kebudayaan hingga proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran RENJA K/L TA 2024 pada K/L yang menangani fungsi pendidikan dan kebudayaan serta agama mulai dari angka dasar, pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi dan RKAKL, APBN-P 2022, RAPBN 2023, koordinasi strategis penyusunan kebijakan, serta koordinasi terhadap berbagai isu-isu strategis Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan lainnya.

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengampu perencanaan pembangunan bidang pendidikan melakukan koordinasi perencanaan lintas K/L dan lintas sumber pendanaan pada proses penyusunan RKP 2024, khususnya pada dan penelaahan Rencana Kerja K/L lain yang berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan bidang Pendidikan menggunakan anggaran pendidikan (20% APBN). Salah satu upaya penyelarasan pemanfaatan anggaran Pendidikan yang tepat sasaran adalah penelaahan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan lintas K/L.

Komponen Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Bilateral Meeting Penyusunan Ranwal RKP 2024 dan Ranwal RENJA K/L TA 2024 dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Agama; serta Perpustakaan Nasional. Dalam Bilateral Meeting, dilakukan penyusunan angka dasar, untuk memastikan bahwa Ranwal Renja K/L dapat mencapai sasaran dan indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sekaligus konsultasi terkait target yang harus dicapai dalam RKP 2024.
2. Trilateral Meeting Penyusunan RKP 2024 dan RKA K/L T.A. 2024 dengan Kementerian Keuangan, dan 3 K/L mitra Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Perpustakaan Nasional.
3. Trilateral Meeting revisi Renja K/L tahun berjalan (2023) juga dilaksanakan untuk mengakomodir perubahan-perubahan pada Renja K/L tahun berjalan, seperti perubahan SOTK, perubahan dan perpindahan anggaran pada RO PN, Kegiatan dan Program serta perubahan informasi kinerja.
4. Multilateral Meeting pengalokasian anggaran Pendidikan dengan K/L yang menggunakan anggaran pendidikan 20%.
5. Musrenbangnas untuk menyepakati target pembangunan sektor di daerah serta menjaring kebutuhan daerah untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKP dan RENJA K/L 2024.
6. Diskusi tentang isu-isu strategis pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dengan instansi terkait, para pakar, lembaga penelitian, dan asosiasi profesi.
7. Pertemuan dan rapat-rapat koordinasi terpadu lintas Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait dalam rangka penyusunan program pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan tahun 2023 dan isu-isu strategis lainnya.
8. Pertemuan dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan program pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan tahun 2023 dan isu-isu strategis lainnya.

1.4 METODOLOGI

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target keluaran kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 antara lain:

1. Diskusi dan konsultasi terkait isu strategis pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan dengan instansi terkait, para pakar, lembaga non pemerintah, dan lainnya;
2. Pertemuan dan rapat koordinasi terpadu Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait dalam rangka penyusunan prioritas nasional bidang agama, pendidikan dan kebudayaan tahun 2023 dan isu-isu strategis lainnya;

3. Workshop, yang melibatkan instansi terkait yang akan membahas fokus pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, isu-isu strategis, kebijakan, program, kegiatan pokok yang terkait dengan pembangunan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Penyusunan dokumen/laporan hasil diskusi tentang fokus pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, isu-isu strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pokok yang terkait dengan pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan.

1.5 KELUARAN KEGIATAN

Keluaran kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 adalah Dokumen (Pendukung) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencakup:

1. Target dan indikator pembangunan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, yaitu RKP 2024 Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
2. Matriks pembangunan RKP 2024
3. Matriks Major Project RKP 2024
4. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan nasional Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

II

CAPAIAN DAN TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 CAPAIAN BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kinerja dari berbagai indikator pembangunan bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan tahun 2022 menjadi dasar penetapan target pada rencana pembangunan tahun 2024. Berdasarkan evaluasi paruh waktu RPJMN, kinerja pembangunan bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan kinerja yang cukup baik. Beberapa indikator sudah melampaui target sampai dengan akhir tahun 2022, namun pada saat yang sama juga masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih untuk dapat memenuhi target RPJMN 2020-2024. Secara umum Kinerja pembangunan sektor Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada RPJMN 2020-2024 dapat dikategorikan *on track*.

Pada tahun 2023 juga dilakukan tinjauan singkat terhadap capaian Renstra K/L 2020-2024 di ketiga K/L mitra kerja. Berdasarkan tinjauan singkat, kinerja indikator Renstra K/L 2020-2024 baik pada Kemendikbud, Kemenag dan Perpunas menunjukkan hasil yang cukup baik dan masih termasuk ke dalam kategori *on track*.

2.1.1 CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN

Upaya pemenuhan layanan dasar pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara, antara lain melalui perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan. Hasil dari upaya pembangunan pendidikan diukur dengan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Pada tahun 2023, indikator pembangunan kualitas pendidikan yang diukur melalui PISA setiap 3 tahun sekali juga dirilis. Sebelumnya, nilai PISA terakhir yang tersedia adalah PISA 2018 yang menjadi *baseline* pada RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, PISA 2021 yang direncanakan untuk menjadi ukuran pembangunan pendidikan pada paruh waktu RPJMN 2020-2024 gagal terlaksana akibat pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di kelas selama hampir 2 tahun. PISA 2021 kemudian dilaksanakan pada Mei-Juni 2022, pada saat proporsi pembelajaran tatap muka sudah lebih banyak dibandingkan pembelajaran jarak jauh.

Hasil PISA 2022 dirilis pada triwulan terakhir tahun 2023 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan *Director of Education and Skills OECD*. PISA 2022 mencerminkan hasil pembelajaran pada masa *lock-down* akibat wabah Covid-19, dimana proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan berbagai penyesuaian dari sisi muatan dan waktu pembelajaran. Dengan karakter khusus tersebut, hasil PISA 2022 diinterpretasikan dengan cara yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan PISA di beberapa periode sebelumnya.

Meskipun nilai PISA 2022 mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia pada PISA 2022 meningkat 5-6 poin dibandingkan dengan PISA 2018. Hal ini menunjukkan bahwa krisis juga terjadi pada negara peserta tes PISA lainnya yang secara umum mengalami penurunan nilai PISA 2022, beberapa diantaranya mengalami krisis yang lebih dalam dibandingkan dengan Indonesia. PISA 2022 juga dapat menggambarkan bahwa siswa tetap mendapatkan pembelajaran selama masa *lock-down* pandemi Covid-19 sehingga pembangunan pendidikan tidak tertunda meskipun dengan berbagai keterbatasan dan melalui berbagai adaptasi.

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Capaian			
			2019 ^{a)}	2020 ^{b)}	2021 ^{c)}	2022
Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
1.	Terpenuhinya layanan dasar					
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Tahun	8.75	8.90	8.97	9.08 ^{d)}
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.95	12.98	13.08	13.10 ^{d)}
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan					
	- SD/MI/Sederajat	Persen	93.03	94.32	97.37	97.82 ^{d)}
	- SMP/MTs/Sederajat	Persen	83.12	85.93	88.88	90.12 ^{d)}
	- SMA/SMK/MA/Sederajat	Persen	58.06	62.28	65.94	65.23 ^{d)}
	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT)	Persen	32.35	33.47	31.19	31.16 ^{d)}
	Persentase Anak Kelas 1 SD/ MI/SDLB yang Pernah Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	63.30	62.48	61.93	-
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya	Nilai				
	- SMA/SMK/MA/Sederajat		0.77	0.77	0.76	0.85 ^{d)}
	- Pendidikan Tinggi		0.19	0.19	0.29	0.35 ^{d)}
	Nilai Rata-Rata Hasil PISA	Nilai				
	- Membaca		371	371	371	359
	- Matematika		379	379	379	366
	- Sains		396	396	396	383
	Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA	Persen				
	- Membaca		30.10	30.10	30.10	25.5
	- Matematika		28.10	28.10	28.10	18.3
	- Sains		40.00	40.00	40.00	34.2
	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi	Persen				
	- Literasi		56.17	57.20	52.54	-
	- Numerasi		25.57	26.50	32.29	-
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing					
	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	Persen	43.72	44.84	45.69	-
	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	Persen	40.6	39.92	40.39	-
	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen		22.13	34.34	-

2.1.2 CAPAIAN BIDANG AGAMA

Pembangunan bidang agama merupakan salah satu pilar utama pembangunan manusia dan masyarakat. Layanan agama yang berkualitas memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang berkarakter serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang rukun dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Layanan tersebut juga mencakup penggalangan dana sosial keagamaan, dan pengelolaan ekonomi umat yang profesional sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan umat, serta penyelenggaraan jaminan produk halal akan memberikan perlindungan baik bagi konsumen dan produsen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Pembangunan pada bidang agama diukur dengan beberapa indikator. Capaian pada tahun 2022 menjadi baseline dalam penyusunan indikator pembangunan pendidikan tahun 2024. Capaian Pembangunan Bidang Agama tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel 2.2
Capaian Pembangunan Bidang Agama

No	Sasaran/Indikator	Target 2024	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Prioritas Nasional 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat					
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,8	73,83	67,46	73,09	76,02
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial						
3	Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama					
3.1.	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	86,00	85,91	N/A	N/A	0,45
3.2.	Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	84,00	77,28	78,00	78,90	83,25
3.3.	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	73,39	72,37	64,15	68,72	74,47
3.4.	Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	77,33	73,72	69,54	75,03	77,61
3.5.	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	76,96	75,40	68,68	73,41	75,60

2.1.3 CAPAIAN BIDANG KEBUDAYAAN

Pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah kebudayaan telah mampu memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terutama pada dimensi ketahanan sosial budaya yang mengukur indikator-indikator berkenaan dengan modal sosial dan modal budaya terus mengalami peningkatan. Capaian Pembangunan Bidang Kebudayaan tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Capaian Pembangunan Bidang Kebudayaan

No	Sasaran/Indikator	Target 2024	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Prioritas Nasional 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan					
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	62,7	55,23	56,72	51,90	
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter						
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu						
1.1.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (persen)	50	-	38,99	92,49	
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia						
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan						
2.1.	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)		43,86	46,61	46,63	

No	Sasaran/Indikator	Target 2024	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
2.2.	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)		37,14	37,38	27,13	
2.3.	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)		33,79	37,03	20,69	

2.2 ARAH KEBIJAKAN

RKP 2024 ditujukan untuk mengakselerasi capaian RPJMN 2020-2024 dan melanjutkan capaian positif pada 2022. Sebagai upaya menjaga kesinambungan dengan pembangunan tahun 2023, RKP Tahun 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan tetap menjaga stabilitas politik dalam menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024.

2.2.1 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (b) reformasi sistem perlindungan sosial; (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; serta (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, disusun arah kebijakan sebagai berikut:

- (a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan (i) penerapan kurikulum, model pembelajaran, sumber belajar, pengembangan inovasi pembelajaran dan praktik belajar-mengajar yang merujuk pada paradigma pembelajaran abad ke-21 untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi *higher order thinking skills*; (ii) peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk peran pendidik dalam penilaian pembelajaran; (iii) pemanfaatan penilaian hasil belajar sebagai basis perbaikan proses pembelajaran di masa mendatang; (iv) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; (v) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (vi) penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter; (vii) peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan; (viii) kesentosaan siswa (*student well-being*); serta (ix) kesehatan mental dalam pendidikan;
- (b) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar L2 Tahun, dengan (i) meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar, termasuk pemulihan di daerah terdampak bencana; (ii) perluasan daya tampung terutama untuk bidangbidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; (iii) penyaluran bantuan pendidikan bagi anak keluarga rentan dan berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi; dan (iv) penguatan upaya pencegahan kasus anak putus sekolah termasuk strategi pendataan, upaya penjangkauan dan pendampingan, dan sinkronisasi lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah;

- (c) kolaborasi lintas sektor untuk penguatan layanan satu tahun prasekolah dengan (i) penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif serta (ii) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini;
- (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan (i) percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru, (ii) peningkatan kualifikasi guru dan dosen, (iii) penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, (iv) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan (v) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (e) penguatan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, mencakup (i) peningkatan kualitas program-program pada peta mutu pendidikan sebagai basis perbaikan dan/atau peningkatan mutu layanan pendidikan hingga pada satuan pendidikan, (ii) penguatan dan akselerasi kapasitas dan mutu akreditasi satuan pendidikan dan program studi, (iii) penguatan standar nasional pendidikan, (iv) penguatan budaya mutu dan kualitas kepemimpinan di sekolah, serta (v) penguatan unit penjaminan mutu di daerah dan satuan pendidikan; dan
- (f) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan serta strategi peningkatan efektivitas pembiayaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan, mencakup (i) penguatan validasi dan akurasi data pokok pendidikan; (ii) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan; (iii) peningkatan efektivitas dan kualitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk optimalisasi pembangunan pendidikan meliputi akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan termasuk kesetaraan pendanaan antara pendidikan umum dan pendidikan bercirikan agama

2.2.2 ARAH KEBIJAKAN BIDANG AGAMA

Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial, melalui:

- (a) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agamaf keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif;
- (b) pengembangan dialog lintas agamayang menumbuhkan sikap toleransi, inklusif, serta kerja sama dan solidaritas antarwarga;
- (c) pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti mekanisme blended finance untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, dan sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat dan Kantor Urusan Agama percontohan ekonomi umat);
- (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Penjamin Halal; serta
- (e) fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan Islam.

2.2.3 ARAH KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN

Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia melalui:

- (1) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan;
- (2) peningkatan kualitas tata kelola serta sarana dan prasarana kebudayaan untuk museum, taman budaya, sanggar, dan pusat kegiatan seni budaya;
- (3) pelaksanaan langkah percepatan manajemen talenta nasional seni budaya melalui
 - i. pengembangan Laboratorium Manajemen Talenta Nasional,
 - ii. pembangunan konsorsium nasional festival berbasis komunitas,
 - iii. pembangunan Manajemen Talenta Nasional international hub, dan
 - iv. penyelenggaraan anugerah seni budaya Indonesia untuk dunia;
- (4) revitalisasi jalur rempah sebagai upaya meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
- (5) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem kebudayaan, termasuk pengembangan pendanaan bidang kebudayaan; serta
- (6) pengembangan wahana ekspresi budaya berbasis digital dalam rangka pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif

Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter melalui:

- (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial;
- (2) peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat;
- (3) penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital;
- (4) pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu; dan
- (5) pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa.

III

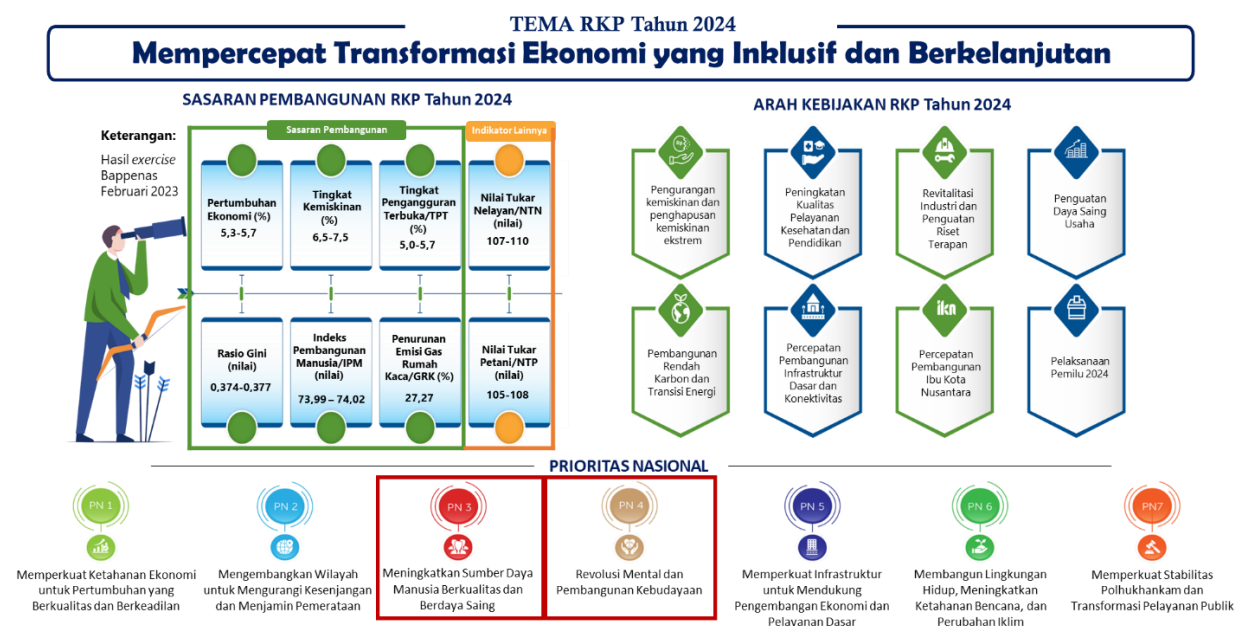
**PENYUSUNAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2024**

**BIDANG AGAMA, PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ditujukan sebagai (1) pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024; (2) dasar dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga, terutama pada program prioritas; (3) pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bagi pemerintah daerah; (4) acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat; serta (5) masukan dalam penyusunan rencana investasi untuk badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional. Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 terdiri dari: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan kebijakan yang diarahkan kepada: (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; (4) Penguatan Daya Saing Usaha; (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; (7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) Pelaksanaan Pemilu. Sasaran dan indikator RKP 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1.

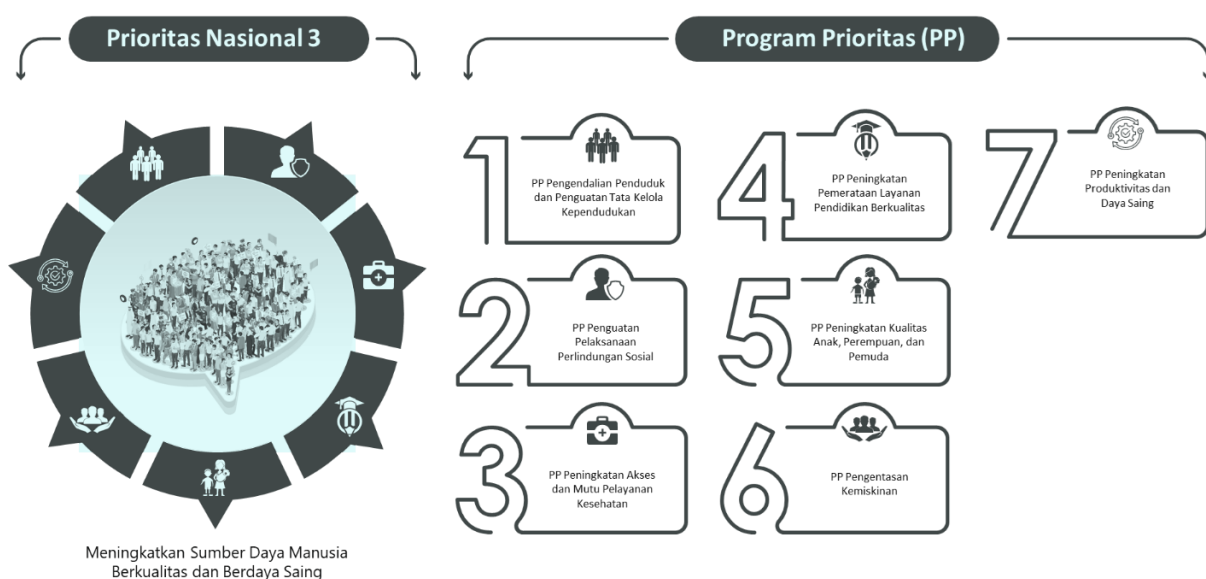


Gambar 3.1 Tema, Sasaran dan Indikator RKP 2024

3.1 PRIORITAS NASIONAL MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING RKP 2024 BIDANG PENDIDIKAN

Prioritas Nasional bidang Pendidikan tercakup dalam Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan Bidang Pendidikan pada RKP 2024 sebagaimana mengacu pada RPJMN 2020-2024, dicapai melalui Program Prioritas 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Program Prioritas 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Selengkapnya, struktur PN 3 dijelaskan pada Gambar III.5, sasaran dan indikator keberhasilan PN 3 dijelaskan dalam tabel III.1

Target penyesuaian pada RKP 2024 pada indikator, terkait perubahan metode perhitungan pada indikator tingkat penyelesaian pendidikan sehingga target RKP 2024 menjadi jauh lebih tinggi dari RPJMN. Selain itu, penyesuaian target dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tengah tahun RPJMN.



Gambar 3.2

Bagan Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baselin e 2019	Realisasi			Target		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan							
3.9	Nilai rata-rata hasil PISA:							
3.9.1	Membaca	371	N/A	N/A	359	394	394	396
3.9.2	Matematika	379	N/A	N/A	366	385	385	388
3.9.3	Sains	396	N/A	N/A	383	399	399	402
3.10	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75	8,90	8,97		9,13	9,24	9,36
3.11	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95	12,98	13,08		13,57	13,22	13,30

No.	Sasaran/Indikator	Baselin	Realisasi			Target		
		e 2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing							
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72	44,35	45,69	44,57	46,87	48,00	49,75
6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60	40,02	40,39	40,49	41,92	43,00	43,10

3.1.1 PP 4 - PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global. Dengan terus meningkatnya penduduk usia produktif 15–64 tahun (70,72 % dari total penduduk), peluang untuk mengoptimalkan bonus demografi semakin besar. Oleh karena itu, afirmasi pemerataan akses pendidikan harus diiringi dengan pemerataan kualitas pendidikan semua jenjang di seluruh Indonesia.

Namun, pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun ini telah memberikan dampak pada proses pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mckinsey pada tahun 2021, siswa sekolah menengah atas menjadi lebih mungkin untuk putus sekolah, dan siswa sekolah menengah terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, cenderung tidak melanjutkan ke pendidikan pasca sekolah menengah. Oleh karena itu, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu tetap menjadi Proyek Prioritas Nasional dan harus tetap dipastikan penganggarannya.

Didasari oleh permasalahan tersebut, maka pembangunan bidang pendidikan pada RKP 2024 menitik beratkan pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam mencapai cita-cita tersebut, disusun Sasaran Prioritas Nasional ini adalah untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai melalui PP Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan adalah meningkatnya partisipasi serta meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator dan target tergambar pada Tabel 3.2.

Penetapan target mengacu pada target akhir RPJMN 2020-2024, dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian target perlu dilakukan pada beberapa indikator yang telah memenuhi capaian melampaui target akhir RPJMN 2020-2024 pada tahun 2024 seperti pada indikator Rasio APK PT 20% termiskin dan 20% terkaya.

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Pembangunan PN 3

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi			Target		
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas								
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas								
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)							
	SMA/SMK/MA Sederajat	0,77	0,77	0,76	0,78	0,81	0,82	0,83
	Pendidikan Tinggi	0,18	0,28	0,29	0,38	0,30	0,31	0,43
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)							
	Membaca	30,10	N/A	N/A	N/A	33,00	33,00	34,10
	Matematika	28,10	N/A	N/A	N/A	30,00	30,00	30,90
	Sains	40,00	N/A	N/A	N/A	42,60	42,60	44,00
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)							

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi				Target	
		2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024
	Literasi	53,20	53,20	52,54	59,49	55,43	58,31	61,20
	Numerasi	22,90	22,90	32,29	45,24	35,67	39,41	43,54
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)							
	SD/MI/ sederajat	95,48	96,00	97,37	97,82	97,93	98,41	98,94
	SMP/MTs/ sederajat	85,23	87,89	88,88	90,13	90,54	91,08	93,33
	SMA/SMK/MA/ sederajat	58,33	63,95	65,94	66,13	69,08	69,68	71,71
4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30	62,48	61,93	63,28	62,74	63,55	64,38
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28	30,85	31,19	31,16	31,52	31,89	32,28

Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dilakukan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (2) Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan. Rincian dan Definisi Operasional dari masing-masing Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional pada Program Prioritas Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dijelaskan pada tabel III.8.

KP 1. Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dilakukan melalui penguatan pada beberapa aspek, yaitu (i) kurikulum, (2) pendidik, (3) metode penilaian, (4) media pengajaran dan pembelajaran, serta (5) metode pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran diupayakan melalui beberapa **Proyek Prioritas**, antara lain dengan:

1. penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif; dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum merdeka, dan penggunaan berbagai perangkat pembelajaran, Kurikulum Merdeka disusun dengan tujuan menciptakan kemandirian siswa dan satuan Pendidikan.
2. peningkatan kompetensi pendidik melalui berbagai program peningkatan kompetensi GTK yang diusung dalam bentuk guru penggerak, organisasi penggerak dan diklat
3. Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan melalui berbagai asesmen yang dikembangkan dalam mengukur tingkat kemampuan peserta didik.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penyediaan berbagai media belajar berbasis digital yang secara lentur dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Kemendikbudristek, Kemenag dan beberapa Pemerintah Daerah sudah mengembangkan platform digital learning yang dapat diakses dari berbagai gawai yang dimiliki siswa.
5. Integrasi Softskill dalam Pembelajaran melalui penguatan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sekolah. Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak lagi satu arah dari guru. Selain itu, penguatan soft skill di luar kelas juga dilakukan melalui berbagai organisasi intra dan ekstra sekolah yang dapat mengembangkan berbagai keterampilan lunak berupa kerjasama tim, kolaborasi, pemecahan masalah dan komunikasi sebagai kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja maupun bermasyarakat.

Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran disasar melalui indikator berikut pada Tabel XXX

Tabel 3.3

Sasaran, Indikator, dan Penganggaran Kp Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran	01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100 %	5,301,526	
			02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	100 %		
PRO-P	Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	01 - Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	2,247 perangkat kurikulum dan pembelajaran	962,162	KEMENDIKBUD-RISTEK, KEMENAG, DAK
			02 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran	62 %		
PRO-P	Peningkatan Kompetensi Pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	15,048 Orang	2,269,737	KEMENDIKBUD-RISTEK, KEMENAG
PRO-P	Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	Menguatnya kualitas penilaian pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	90 %	696,486	KEMENDIKBUD-RISTEK, KEMENAG
PRO-P	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan	01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK	23 %	786,123	LPPRRI, TVRI, KEMENDIKBUD-RISTEK, KEMENAG
PRO-P	Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	Terwujudnya integrasi softskill dalam pembelajaran	01 - Kab/Kota yang menerapkan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan	514 Kab/kota	587,018	KEMENAG, KEMENDIKBUD-RISTEK

KP 2. Kegiatan Prioritas Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

Wajib Belajar 12 tahun yang telah ditetapkan sejak RPJMN 2014-2019, dilanjutkan dengan percepatan pada periode RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2024, percepatan akses pendidikan Wajib Belajar 12 tahun dilakukan melalui peningkatan Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diakselerasi pada jenjang Pendidikan Menengah yang ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada jenjang SMA dan SMK. Selanjutnya, Bantuan Pendidikan PIP dengan *unit cost* terbaru diharapkan akan direplikasi oleh satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama pada tahun 2025.

Dalam memenuhi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan juga terus diakselerasi melalui rupiah murni hingga pinjaman dan hibah dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan untuk memenuhi sarana dan prasarana layanan dasar pendidikan pada APBN terbagi dalam 2 kategori belanja, yaitu melalui Belanja Pemerintah Pusat, dan Belanja Transfer ke Daerah.

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui belanja pemerintah pusat
 - a. Rupiah Murni

Pembangunan sarana dan prasarana jenjang pendidikan menengah juga dilaksanakan oleh K/L lain yang tidak secara langsung mengampu bidang Pendidikan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan sarpras pendidikan berdasarkan amanat Perpres 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dilandasi oleh Perpres 43 tersebut, Kementerian PUPR membentuk suatu satuan kerja khusus sebagai pelaksana teknis percepatan implementasi Perpres 43 tahun 2019. Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis pada tahun 2024 diharapkan akan menyelesaikan Rehabilitasi Berat/Renovasi Berat/Pembangunan 623 Satuan Pendidikan.

Pada jenjang pendidikan menengah, beberapa K/L juga melaksanakan pendidikan menengah vokasional seperti KLHK yang menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) dan Kemenperin yang menyelenggarakan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) dan Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK).

Berdasarkan informasi dari KLHK pada periode penelaahan, SMKKN diselenggarakan di 5 titik, yaitu SMKKN Samarinda, SMKKN Pekanbaru, SMKKN Manokwari, SMKKN Kadipaten, SMKKN Makassar. Masing-masing SMKKN telah mendapatkan izin dari masing-masing kepala daerah dalam menyelenggarakan satuan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Kegiatan belajar mengajar SMKKN dibiayai melalui rupiah murni DIPA KLHK, sehingga siswa hanya perlu mengeluarkan biaya untuk operasional pribadi seperti seragam dan alat tulis pribadi.

Sedangkan satuan pendidikan di bawah Kemenperin ada 5 SMK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sama halnya dengan SMKKN, SMTI dan SMAK di bawah Kemenperin juga menggunakan mekanisme beasiswa

b. SBSN

Penyelenggaraan sarana dan prasarana bidang pendidikan di Kementerian Agama sebagian besar dilaksanakan melalui pembiayaan SBSN. Salah satu proyek yang dilaksanakan melalui pembiayaan SBSN adalah pembangunan ruang kelas baru dan berbagai sarpras pendukung pembelajaran pada Madrasah Negeri milik Kementerian Agama, dari Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan Madrasah Aliyah (MA).

c. PHLN

Kementerian Agama sejak tahun 2024 melaksanakan program Madrasah Education Quality Reform (MEQR) melalui pembiayaan PHLN oleh Bank Dunia. Salah satu keluaran dari program MEQR adalah perluasan akses pendidikan madrasah yang berkualitas. Perluasan akses tersebut dilaksanakan melalui bantuan rehabilitasi/renovasi prasarana pendidikan, serta bantuan pengadaan sarana pendidikan seperti pemutakhiran teknologi dan informasi untuk menunjang pembelajaran, penilaian dan tata kelola satuan pendidikan.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui transfer daerah

a. DAK Fisik dan Non Fisik

DAK fisik dan Non Fisik menjadi instrumen pembiayaan sarpras pendidikan terbesar dalam postur APBN.

b. DAU earmark Pendidikan

Sejak tahun 2023, mulai diatur Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan. Pengaturan pemanfaatan DAU disampaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan terkait ketentuan umum dan petunjuk teknis yang dimutakhirkan setiap

tahun. Pengaturan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang ditransfer melalui DAU terhadap capaian teknis prioritas pembangunan, dan meminimalisasi potensi pemanfaatan DAU untuk kegiatan yang bersifat dukungan.

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK melakukan penelaahan terhadap fungsi pendidikan di K/L lain. Dalam penelaahan, terus didorong terkait penyetaraan satuan biaya antara Kemendikbudristek dengan berbagai satuan pendidikan di bawah K/L teknis non pengampu sektor pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.

Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun diukur melalui indikator pada Tabel III.4 berikut.

TABEL 3.4
SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP AFIRMASI AKSES DAN PERCEPATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	105.98 %	46,960,873	
			02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	93.01 %		
			03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / SMLB / Sederajat	85.80 %		
			04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA/BA	36.55 %		
PRO-P	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan	01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya	17,429 lembaga	21,811,415	KEMENAG, KEMENPUPR, DAK, KEMENDIKBUDRISTEK
PRO-P	Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	100 %	24,285,174	KEMENDIKBUDRISTEK, KEMENAG
PRO-P	Penanganan Anak Tidak Sekolah	Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah	01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang-kurangnya 100%	478 Kab/Kota	19,920	KEMENDIKBUDRISTEK, KEMENAG
			02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	87 Kab/Kota		
			03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	149 Kab/Kota		
PRO-P	Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah	01 - Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	363 Kab/Kota	844,364	KEMENAG, KEMENDIKBUDRISTEK

KP 3. Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih menemui berbagai masalah dan kendala. Diantaranya adalah keterbatasan fiscal daerah dalam memenuhi standar jumlah dan standar kualitas guru yang merata. Pembiayaan untuk memenuhi dilakukan melalui Belanja Pemerintah Pusat, DAK Non Fisik, dan DAU.

Pada tahun 2024, salah satu upaya dalam pembiayaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan yang merata adalah dengan memberikan insentif melalui earmark Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara khusus menyebutkan Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas serta Kegiatan dan Subkegiatan pendukung yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan.

Berdasarkan PMK No. 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, rincian pemanfaatan DAU untuk pendidikan termasuk belanja yang terkait dengan:

1. kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan; dan
2. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.

Belanja Pegawai ASN guru dan tenaga kependidikan sebagaimana poin 2 di atas, diatur bahwa Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru tenaga kependidikan Daerah paling banyak 25% dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang pendidikan. Persentase tersebut meningkat 5% dari tahun anggaran 2023 yang hanya memperbolehkan pemanfaatan DAU untuk gaji dan tunjangan ASN Guru sebesar 20%. Kelonggaran pemanfaatan anggaran DAU untuk membiayai gaji ASN guru dan tenaga kependidikan tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi daerah untuk melakukan rekrutmen guru baru dan menjamin pemerataan guru berkualitas di seluruh wilayah kerja pemerintah daerah.

Pada RKP 2024, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui:

1. Revitalisasi LPTK sebagai institusi pencetak guru.
2. Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta bantuan pendidikan gelar dan non gelar.
3. Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan melalui penataan guru, pemberian insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah 3T atau wilayah khusus
4. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja melalui Tunjangan Profesi Guru, Insentif, serta pengembangan karir guru melalui Ruang Talenta Guru.

Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diukur melalui indikator pada Tabel 3.5 berikut.

TABEL 3.5
SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP
PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENEMPATAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PN/PP/KP/ProP		Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Peningkatan Pengelolaan & Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48,83 %	15,759,798	
			01 - Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik	34,31 %		
PRO-P	Revitalisasi LPTK	Terlaksananya revitalisasi LPTK	01 - Jumlah LPTK yang direvitalisasi	4 lembaga	40,000	KEMENDIKBU D-RISTEK
PRO-P	Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik	01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik	91,74 %	1,420,083	KEMENDIKBU D-RISTEK, KEMENAG
			02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	89,21 %		
PRO-P	Pemenuhan dan Distribusi Tenaga	Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik	45 kab/kota	788,686	KEMENDIKBU D-RISTEK, KEMENAG

PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
Pendidik Berbasis Kebutuhan	pendidik berbasis kebutuhan	02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik	45 kab/kota		
		03 - Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Dikus baik	14 provinsi		
PRO-P Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja	01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu	758,119 Orang	13,511,030	KEMENDIKBU D-RISTEK, KEMENAG

KP 4. Kegiatan Prioritas Penjaminan Mutu Pendidikan

Terdapat dua jenis penjaminan mutu pendidikan, yaitu penjaminan mutu melalui rapor mutu Pendidikan, serta melalui akreditasi lembaga pendidikan. Masing-masing memiliki instrument penilaian yang saling berkorelasi. Hasil akreditasi maupun rapor satuan pendidikan menghasilkan rekomendasi yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran sampai tata kelola satuan pendidikan.

1. RAPOR PENDIDIKAN

Rapor Mutu adalah instrumen penjaminan mutu internal berupa evaluasi diri satuan pendidikan, di mana indikatornya mengukur delapan capaian standar nasional (SNP). Data yang ada pada Rapor Mutu bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga hasil pengisian (input) langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi Rapor Mutu.

Rapor Pendidikan adalah penyempurnaan dari Rapor Mutu, indikatornya disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Dalam Rapor Pendidikan satuan pendidikan tidak melakukan pengisian data langsung ke dalam instrumen, melainkan data diambil dari sistem yang sudah ada, termasuk dari Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber lain yang relevan. Rapor Pendidikan sudah terintegrasi dari beberapa sumber seperti Asesmen Nasional, Data Guru dan Tenaga Kependidikan serta aplikasi Sumber Daya Sekolah, yaitu Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)

Dimensi dalam Rapor Pendidikan Dasar dan Menengah:

- A. Dimensi A: Mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik – Aspek Output
- B. Dimensi B: Pemerataan pendidikan yang bermutu – Aspek Output
- C. Dimensi C: Kompetensi dan kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan – Aspek Input
- D. Dimensi D: Mutu dan relevansi pembelajaran – Aspek Proses
- E. Dimensi E: Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel – Aspek Input

Dimensi dalam Rapor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

- A. Dimensi A: Capaian Perkembangan Anak
- B. Dimensi B: Pemerataan Akses ke Layanan Berkualitas
- C. Dimensi C: Ketersediaan, Kompetensi, dan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- D. Dimensi D: Kualitas Proses Pembelajaran
- E. Dimensi E: Kualitas Pengelolaan Satuan Pendidikan

2. AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akreditasi Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). BAN juga melakukan evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh lembaga mandiri terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi, BAN juga menyusun rekomendasi kepada Menteri Pendidikan setiap 3 tahun sekali atau berdasarkan perintah Menteri. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 merupakan hasil pengembangan instrument akreditasi yang menerapkan pendekatan penilaian berbasis Kinerja, berbeda dengan instrument sebelumnya yang lebih menitik beratkan pada administrasi. Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) yaitu Instrumen Penjaringan data yang digunakan oleh asesor pada waktu visitasi.

Berdasarkan Kepmendikbud No. 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan terdiri dari 4 komponen, antara lain:

- 1) Mutu Lulusan
 - a. Karakter Siswa
 - b. Kompetensi Siswa
 - c. Kepuasan Pemangku Kepentingan
- 2) Proses Pembelajaran
 - a. Kualitas Pembelajaran di Kelas
 - b. Iklim Belajar di kelas
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
- 3) Mutu Guru
 - a. Kompetensi Guru
 - b. Pengembangan profesi guru
 - c. Inovasi dan kreativitas guru
- 4) Manajemen Sekolah/Madrasah
 - a. Pencapaian Visi dan Misi
 - b. Kompetensi Supervisi Kepala sekolah/madrasah
 - c. Budaya Sekolah/Madrasah
 - d. Pelibatan Masyarakat
 - e. Pengelolaan Kurikulum
 - f. Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - g. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - h. Pengelolaan Pembiayaan
 - i. Pengelolaan Kesiswaa

Pada RKP 2024, Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan melalui:

1. Penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi melalui kebijakan untuk meningkatkan peran Badan Akreditasi Nasional S/M maupun PT untuk memastikan seluruh satuan pendidikan yang melayani masyarakat telah melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan (9SNP) yang terdiri dari: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses Pendidikan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan (7) Standar Pembiayaan Pendidikan (8) Standar Penilaian Pendidikan.
2. Perluasan budaya mutu pendidikan melalui pemetaan mutu, pengembangan model, supervisi, dan fasilitasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Penjaminan Mutu Pendidikan diukur melalui indikator pada Tabel III.6 berikut.

**TABEL 3.6 SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Penjaminan Mutu Pendidikan	Terwujudnya mutu pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	83.37 %	1,510,365	
			02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	78.95 %		
			03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	76.29 %		
			04 - Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)	130 PT		
			05 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)	68,03 %		
			06 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)	59.20 %		
PRO-P	Penguatan Kapasitas & Akselerasi Akreditasi	Terlaksananya penguatan kapasitas & akselerasi akreditasi	01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP	103.533 satuan pendidikan	381,997	KEMENDIKBUD-RISTEK, KEMENAG
PRO-P	Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan	01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan	10 Rekomendasi Kebijakan	1,128,368	KEMENAG, KEMENDIKBUD-RISTEK

KP 5. Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

Pengelolaan pendidikan di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kewenangan, memberikan tantangan yang cukup berat pada penata kelolaannya. Pengelolaan pendidikan membutuhkan peran dari berbagai pemangku kebijakan di tingkat Nasional dan Daerah, Lembaga Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, murid sampai dengan wali murid dan seluruh komunitas di lingkungan masyarakat.

Tata kelola pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah di tetapkan secara efektif dan efisien. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dilakukan dengan:

1. Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan melalui penguatan peran pemerintah pusat dalam mendukung penerapan SPM pendidikan oleh seluruh pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan melalui forum rutin tahunan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional dan Provinsi.
2. Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan melalui penguatan kebijakan anggaran pendidikan 20% yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah melalui dana transfer ke daerah. Pada tahun 2024 juga mulai disusun rekomendasi pemanfaatan anggaran pendidikan agar 20% APBN yang dianggarkan untuk Fungsi Pendidikan benar-benar akan memberikan dampak pada pembangunan pendidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan sebagai basis data utama perencanaan bidang pendidikan. Penyusunan basis data pendidikan dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kemenag melalui EMIS (Education Management Information Systems). Kedepannya, Dapodik dan EMIS akan terus dikembangkan untuk menghasilkan koneksi data yang lebih akurat dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
4. Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI dilakukan lintas sektor dan lintas pengampu kebijakan, antara pusat, daerah dan mitra pembangunan.

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan diukur melalui indikator pada Tabel 3.7 berikut.

TABEL 3.7
SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP PENINGKATAN TATA KELOLA PENDIDIKAN

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya tata kelola pendidikan	01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	100 %	31,683	
PRO-P	Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan	01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	34 provinsi	26,528	KEMENDAGRI, KEMENAG
PRO-P	Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	Menguatnya Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan	514 Kab/kota	-	KEMENDIKBUD-RISTEK
PRO-P	Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan	01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan	95.33 %	4,058	KEMENDIKBUD-RISTEK, KEMENAG
PRO-P	Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI	01 - Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	100 Kab/kota	1,097	KEMENDIKBUD-RISTEK

3.1.2 PP 7 – PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

Pendidikan juga mendukung Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. PP Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing disusun untuk penguatan supply side dari lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Dalam mendukung PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, Sasaran dan indikator yang akan dicapai dijelaskan pada Tabel 3.8 di bawah.

TABEL 3.8
SASARAN DAN INDIKATOR PP
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi			Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing							
Meningkatnya produktivitas dan daya saing							
7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78	5,94	6,45	5,67	2,60	2,80
7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	42,76	40,46	34,34	38,53	36,29	37,31

Sumber: BPS 2022; RKP 2024.

PP Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing dicapai melalui empat Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha; (2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, (3) Peningkatan Sertifikasi Kompetensi (4) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

3.2 PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN RKP 2024 BIDANG AGAMA DAN KEBUDAYAAN

“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendagagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.” – RKP 2024

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan untuk mendayagunakan beragam warisan budaya melalui penguatan gerakan revolusi mental dan Pembinaan ideologi Pancasila; pemajuan dan pelestarian kebudayaan; penguatan pemahaman dan pengamalan ajaran nilai agama yang moderat, inklusif, dan berorientasi kemaslahatan; serta peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan Inovasi. Selain menyusun perencanaan bidang Agama dan Kebudayaan, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan selaku Koordinator Penyusunan PN 4 – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024, mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan PN 4 pada RKP 2024.

3.2.1 **PP 3 – PROGRAM PRIORITAS MODERASI BERAGAMA MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL**

Transformasi layanan umat meliputi perubahan sikap, perilaku, dan karakter melayani para SDM Kemenag, disamping pengembangan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja Kemenag dalam memberikan layanan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam melaksanakan Transformasi layanan umat, beberapa hal yang menjadi dasar perubahan antara lain:

1. Sarana dan Prasarana
 - Pembangunan prasarana KUA dan Pusat Pelayanan Literasi Keagamaan Islam melalui SBSN
 - Penguatan sarana layanan keagamaan Islam yang mendukung langsung kinerja Ditjen Bimas Islam (e.g. Kendaraan layanan keagamaan Islam mobile)
2. Sumber Daya Manusia
 - Penguatan Profesionalisme dan Kompetensi SDM layanan keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat (Penyuluh Agama, Penghulu, Nazhir, dst.)
 - Penguatan mekanisme perekrutan, tata kelola, dan pembinaan SDM layanan keagamaan Islam yang profesional
3. Kelembagaan & Regulasi
 - Penguatan kelembagaan layanan keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat
 - Penguatan regulasi layanan keagamaan Islam (RUU Wakaf, Rperpres Peta Jalan Wakaf, dst.)
 - Penguatan ekosistem layanan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat dan antarpemangku kepentingan
4. Inovasi Layanan
 - Penguatan Transformasi Layanan Berbasis Digital (e.g. SIMBI, SIWAK, dst)

- Pengembangan Manajemen Layanan berbasis digital, antara lain membangun integrasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain antara Kemenag dan BPN terkait sertifikasi tanah wakaf, dan Kemenag, BI, OJK, Baznas, BWI terkait pemetaan program integratif ekonomi umat.

Penguatan peran penghulu sebagai Agent of Change juga menjadi arah kebijakan,

1. Penyuluh & penghulu adalah garda terdepan layanan keumatan Kementerian Agama kepada masyarakat
2. Berperan penting sebagai inspirator, influencer, & orator/narator pembangunan
3. Peran penyuluh & penghulu tidak hanya sekedar terkait layanan default KUA (nikah, bimbingan Keluarga, manasik haji, ZIS, dll), tetapi juga berperan pada hal lain, misal:
 - Pengentasan kemiskinan: pendataan, advokasi ke ZIS, motivasi perubahan pola pikir & sikap
 - Ekonomi umat: advokasi & pemberdayaan UMKM
 - Kesehatan Masyarakat: pencegahan stunting
 - Kerukunan umat: mediasi & pencegahan konflik sosial keagamaan

Namun, pembangunan bidang Agama masih menemui berbagai tantangan di tahun 2024 antara lain (1) praktik pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, moderat, dan saling menghargai belum optimal; (2) ruang dialog lintas agama yang mendorong kerja sama masih kurang dikembangkan; (3) dana sosial keagamaan belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat; (4) layanan keagamaan yang berkualitas belum merata; serta (5) kerukunan umat dalam kontestasi pesta demokrasi tahun 2024 perlu dijaga.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, disusun isu Strategis pembangunan bidang agama yaitu mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial melalui:

Tabel 3.9

Rincian Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas pendukung Program Prioritas Moderasi Beragama Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial

	PP		KP		PRO-P
4.3	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	4.3.1	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	4.3.1.1	Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat
				4.3.1.2	Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru
				4.3.1.3	Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan
				4.3.1.4	Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran
				4.3.1.5	Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa
		4.3.2		4.3.2.1	Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama

	PP		KP		PRO-P
			Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	4.3.2.2	Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				4.3.2.3	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong
		4.3.3	Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	4.3.3.1	Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama
				4.3.3.2	Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama
				4.3.3.3	Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi
		4.3.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	4.3.4.1	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan
				4.3.4.2	Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga
				4.3.4.3	Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
				4.3.4.4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		4.3.5	Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	4.3.5.1	Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan
				4.3.5.2	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat
				4.3.5.3	Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel

KP 1. Kegiatan Prioritas Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama

Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama dilakukan melalui penguatan penyiaran agama kepada seluruh umat beragama pada lingkungan masyarakat, pada sistem pendidikan, rumah ibadah, dan ruang publik.

Arah kebijakan Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat
2. Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru
3. Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan
4. Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran
5. Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa

Tabel 3.10
SASARAN, INDIKATOR, DAN PENGANGGARAN KP Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan
PRAKTIK BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF JALAN TENGAH

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama	90,80 %	1,257,163	
PRO-P	Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:5 nilai	841,736.9	KEMENAG, TVRI
PRO-P	Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama	71,60 %	243,369.1	KEMENAG
PRO-P	Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	97,00 %	13,000	KEMENAG
PRO-P	Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	70 %	146,457.6	KEMENAG
PRO-P	Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama	5886 orang	12,599.43	KEMENAG

KP 2. Kegiatan Prioritas Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama dilakukan melalui

1. Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama
2. Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong

Tabel 3.11
Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
--	---------------	---------	-----------	--------	----------	--------------------

KP	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan	74 %	353.571.1	
PRO-P	Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	5 %	66.768.54	KEMENAG, KEMENKO-POLHUKAM
PRO-P	Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi	15 %	225.108.9	KEMENAG
PRO-P	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100 %	61.693.7	KEMENDAGRI, KEMENAG

KP 3. Kegiatan Prioritas Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya

Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya dilakukan melalui:

1. Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama
2. Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Tabel 3.12

Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	Persentase kasus konflik budaya & agama yang diselesaikan	96,25 %	168398.7	
PRO-P	Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan	100 kegiatan	8720.611	KEMENAG
PRO-P	Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses	30 %	102186.1	KEMENAG
PRO-P	Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi	131 event	57492.08	KEMENAG

KP 4. Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dilakukan melalui

1. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan
2. Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga.
3. Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tabel 3.13

Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya	Persentase kasus konflik budaya & agama yang diselesaikan	96,25 %	168398.7	
PRO-P	Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan	100 kegiatan	8720.611	KEMENAG
PRO-P	Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses	30 %	102186.1	KEMENAG
PRO-P	Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran yang difasilitasi	131 event	57492.08	KEMENAG

KP 5. Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan

Pengembangan zakat & wakaf harus diarahkan menjadi bagian integral dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Inovasi pengelolaan zakat & wakaf harus terus ditumbuhkan & dikembangkan (digitalisasi, sertifikasi, dll) untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap peran penting zakat & wakaf yang berfungsi sebagai wujud layanan keagamaan & upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaborasi Multi Sektor perlu diperkuat dalam pengelolaan dana keagamaan (Bank Indonesia, Industri Keuangan Syariah, Fintech, KNKS, Bank Wakaf Mikro, Lembaga ZIS, BAZNAS, & BWI).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dilakukan melalui

1. Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan
2. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat
3. Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel

Tabel 3.14

Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Terwujudnya peningkatan	Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)	70,33 %	1,923,078	

		fasilitasi pelayanan keagamaan				
PRO-P	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Terwujudnya fasilitas pelayanan keagamaan	Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi	265.000 unit	750,050.5	KEMENAG
PRO-P	Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/ bahagia/ sukinah/hittaya sukhaya	1715500 keluarga	25,507.33	KEMENAG
PRO-P	Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal	Persentase produk yang tersertifikasi halal	66 %	275,289.8	KEMENAG
PRO-P	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah	Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (persen)	86,50 %	872,230.5	KEMENAG, KEMENKES
			Persentase Petugas haji profesional	87,55 %		

Tabel 3.15

DEFINISI OPERASIONAL PADA PP MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL

Level	Nomenklatur	Definisi Operasional
PN	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PP	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	
KP	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	
ProP	01 - Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	Peningkatan kualitas penyuluh agama , dan pengembangan metode Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat
ProP	02 - Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru	Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru
ProP	03 - Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan	Penguatan Peran Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan
ProP	04 - Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran	Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran meliputi peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan lingkungan, pengembangan program/kegiatan dakwah, dan tata kelola rumah ibadah
ProP	05 - Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa	Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan melalui pengembangan forum diskusi dan dialog di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa
KP	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	
ProP	01 - Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama	Melakukan sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan tentang KUB, dan penegakan hukum dalam rangka memberikan pelindungan bagi umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama.
ProP	02 - Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa melalui program/kegiatan moderasi beragama
ProP	03 - Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong	Penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB) meliputi aspek kelembagaan, SDM, pengembangan program/kegiatan, serta sarana dan prasana untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong
KP	Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	
ProP	01 - Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama	Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama melalui program/kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya keagamaan.

Level	Nomenklatur	Definisi Operasional
ProP	02 - Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama	Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama dengan melakukan preservasi, pengkajian, dan pemanfaatan (alih media, alih aksara, dan alih Bahasa) naskah nusantara/manuskrip bernafas agama, serta penyelenggaraan festival literasi keagamaan.
ProP	03 - Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan situs keagamaan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta penyelenggaraan perayaan keagamaan dan festival budaya berbasis keagamaan untuk memperkuat toleransi
KP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	
ProP	01 - Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan, catatan perkawinan, layanan KUA, pengurusan jenazah
ProP	02 - Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga	Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga meliputi kursus/bimbingan calon pengantin, serta bimbingan keluarga Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Konghucu
ProP	03 - Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal meliputi antara lain: perumusan dan penetapan NSPK JPH, sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan LPH dan auditor halal, pengembangan kerja sama penyelenggaraan JPH dengan lembaga dalam dan luar negeri
ProP	04 - Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Haji dan Umrah	Peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah melalui pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji dalam dan luar negeri, pelindungan kepada jemaah haji
KP	Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	
ProP	01 - Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan	Pemberdayaan dana sosial keagamaan dengan pengembangan sistem data terpadu dana sosial keagamaan, pengembangan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan.
ProP	02 - Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	Pengembangan kelembagaan ekonomi umat, fasilitasi BWI, Baznas dan lembaga ekonomi umat lainnya
ProP	03 - Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel	Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel melalui fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)

3.2.2 PP 2 – PROGRAM PRIORITAS MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA

Sebagai bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya. Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan kapitalisasi nilai-nilai dan kekayaan budaya sehingga membentuk sosial-ekonomi berbasis kebudayaan.

Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 dititik beratkan pada ketahanan budaya dan karakter bangsa. Pada masa Pandemi Covid-19, kebudayaan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat ditutupnya akses berkumpul, berkunjung dan melaksanakan event. Selama masa pandemi COVID-19, terdapat Program Bantuan Pemerintah Apresiasi Pelaku Budaya terdampak COVID-19 (APB) bagi 44.392 seniman dengan harapan para seniman, pelaku budaya dan pekerja kreatif agar tetap dapat berkarya dan mempertahankan mata pencahariannya di bidang kebudayaan. Selain itu, muncul juga berbagai media baru melalui saluran virtual sebagai wahana ekspresi budaya di masa pandemi. Melalui platform media berbasis teknologi komunikasi tersebut, para seniman dan pelaku budaya tetap bisa produktif, kreatif, dan konsisten memperkenalkan kekayaan seni dan budaya bangsa kepada masyarakat. Diharapkan dengan perluasan media dalam menampilkan ekspresi budaya Indonesia lebih dapat menjangkau audiens lebih luas lagi. Oleh sebab itu, pemajuan dan pelestarian kebudayaan masih menjadi prioritas nasional dengan harapan semakin luasnya pemahaman budaya Indonesia bagi publik. Berikut sasaran dan indikator pembangunan pada PP Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

Beberapa tantangan pemajuan dan pelestarian kebudayaan tahun 2024, antara lain:

- (1) warisan budaya belum dikelola secara optimal sebagai modal dasar pembangunan dan akselerator transformasi ekonomi,
- (2) tatakelola pembangunan kebudayaan belum optimal,
- (3) ekosistem seni budaya belum terbangun untuk mendukung kreativitas dan daya cipta pelaku seni budaya, serta
- (4) talenta seni budaya yang memperoleh rekognisi global masih terbatas.

Berdasarkan tantangan tersebut, disusun arah kebijakan memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui:

Tabel 3.16

Sasaran, Indikator dan Target PP Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan

Sasaran / KP	Indikator	Target	Satuan
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia			
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	Nilai Dimensi Warisan Budaya	52,11	Nilai
	Nilai Dimensi Ekspresi	38,19	Nilai
	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	43,52	Nilai
KP 01. Revitalisasi & Aktualisasi Nilai Budaya & Kearifan Lokal	Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	30	Persen
KP 02. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,50	Persen

Sasaran / KP	Indikator	Target	Satuan
Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36	Persen
KP 03. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,82	Persen
KP 04. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15 % di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	12	festival
KP 05. Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	80	Persen

KP 1. Kegiatan Prioritas Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dilakukan melalui:

1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip
3. Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa

Tabel 3.17

Sasaran, Indikator dan Target KP Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase cagar budaya & warisan budaya takbenda yang ditetapkan	30 %	253690.9	
PRO-P	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal	Terwujudnya pelindungan, pengembangan, & pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal & ekstrakurikuler kesenian	34 %	89843.18	KEMENDIK-BUDRISTEK
PRO-P	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	Jumlah museum milik pemerintah daerah yang ditingkatkan kualitas program publiknya	115 unit	123254.5	KEMENDIK-BUDRISTEK
PRO-P	Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya,	Terwujudnya pelestarian, pengembangan & pemanfaatan manuskrip & arsip sebagai sumber nilai	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	21,18 %	40593.16	PERPUSNAS, ANRI

Sejarah, Memori Bangsa	dan Kolektif	budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa				
------------------------	--------------	---	--	--	--	--

KP 2. Kegiatan Prioritas Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat

Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat melalui

1. Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film
2. Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional
3. Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
4. Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim

Tabel 3.18

Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya pengembangan & pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa & kesejahteraan rakyat	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0,50 %	614105.4	
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36 %		
PRO-P	Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film	Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film	Jumlah produksi film, musik dan media baru	40 produksi	283504.2	KEMENDIKBUD-RISTEK
PRO-P	Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional	Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3 event	158353.7	KEMENDIKBUD-RISTEK
PRO-P	Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	65 %	170247.6	KEMENDIKBUD-RISTEK
PRO-P	Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim	Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya	3 komunitas	2000	KKP

KP 3. Kegiatan Prioritas Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif

Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif melalui:

1. Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup
2. Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya
3. Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta

Tabel 3.19

Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Pelindungan Hak Kebudayaan & Ekspresi Budaya

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Pelindungan Hak Kebudayaan & Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Terwujudnya hak pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,82 %	36032.79	
PRO-P	Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	10 wilayah adat	21332.79	KEMEN-DIKBUD-RISTEK, KEMEN-ATR/BPN
PRO-P	Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Jumlah lembaga kepercayaan & lembaga adat yang difasilitasi untuk penguatan lembaga	40 lembaga	13700	KEMEN-DIKBUD-RISTEK
PRO-P	Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta	Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal & hak cipta	Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi	120 data	1000	KEMEN-KUMHAM, KEMEN-DIKBUD-RISTEK

KP 4. Kegiatan Prioritas Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia

Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia dilakukan melalui:

1. Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara
2. Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri

Tabel 3.20
 Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Pengembangan Diplomasi Budaya

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia	Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang & 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan	12 festival	17987.04	
PRO-P	Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara	Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	50 negara	17987.04	KEMENDIKBUD-RISTEK
PRO-P	Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri	Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan	Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	2 event	0	KEMENDIKBUD-RISTEK

KP 5. Kegiatan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui:

1. Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
4. Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
5. Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan

Tabel 3.21
 Sasaran, Indikator, dan Penganggaran KP Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan

	PN/PP/KP/ProP	Sasaran	Indikator	Target	Rp. Juta	Instansi Pelaksana
KP	Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	80 %	124174.4	
PRO-P	Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan	Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	Jumlah layanan pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi Kebudayaan	1 layanan	0	KEMENDIKBUD-RISTEK
PRO-P	Peningkatan Kualitas Sumber	Terwujudnya peningkatan kualitas	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh	980 orang	46337.8	KEMENDIKBUD-RISTEK

	Daya Manusia Kebudayaan	sumber daya manusia kebudayaan	peningkatan kapasitas dan sertifikasi			
PRO-P	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	150 kelompok masyarakat	70164.3	KEMEN-DIKBUD-RISTEK
PRO-P	Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan	1 layanan	0	KEMEN-DIKBUD-RISTEK
PRO-P	Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan	1 layanan	7672.26	KEMEN-DIKBUD-RISTEK

3.3 PENYUSUNAN MAJOR PROJECT RKP 2024

Selain Prioritas Nasional bidang pendidikan yang tercantum di dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, disusun juga Major Project sebagai prioritas nasional yang bersifat lintas sektor. Sektor Agama, Pendidikan dan Kebudayaan selain mendukung Prioritas Nasional bidang Pendidikan, Agama dan Kebudayaan, juga mendukung pembangunan lintas sektor melalui Major Project lainnya dalam RKP 2024. Major Project ditujukan sebagai prioritas lintas sektor yang diproyeksikan untuk memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pembangunan. Sektor Agama, Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kontribusi penting bagi beberapa Major Project pada RKP 2024, antara lain sebagai berikut:

1. MP Destinasi Pariwisata Prioritas melalui perlindungan warisan budaya dan cagar budaya nasional. Warisan Budaya Dunia yang menjadi bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas antara lain adalah Kawasan Candi Borobudur, yang dikembangkan secara lintas sektor dan dikoordinasikan
2. MP Pengelolaan Terpadu UMKM Pendidikan Kewirausahaan pada satuan Pendidikan dan bantuan sertifikasi Halal bagi UMKM oleh Kementerian Agama.
3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay melalui bantuan pendidikan bagi masyarakat Papua (OAP) untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
4. MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting didukung melalui beberapa RO. Pada Sektor Pendidikan, dilaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah UKS/M pada seluruh satuan Pendidikan sebagai dasar pembiasaan pola hidup sehat yang dimulai sejak masa persekolahan. Pada sektor Agama juga dilakukan pembekalan Bimbingan Perkawinan bagi para calon pengantin yang kelak akan menjadi orang tua agar mencetak generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.
5. MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 melalui penguatan sekolah vokasi berbasis industri 4.0 yang dirancang untuk mendukung pemenuhan sumber daya manusia berkualitas bagi Kawasan Strategis Nasional. Fokus pengembangan dituangkan dalam highlight proyek, antara lain pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel, revitalisasi lembaga pendidikan vokasi yang mendukung industri 4.0, serta pelaksanaan pelatihan vokasi, pelaksanaan Kartu Prakerja dan pemagangan di industri.

6. MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui bantuan pendidikan bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta bantuan operasional pendidikan bagi satuan pendidikan formal dan non-formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
7. MP Transformasi Digital melalui pengembangan platform pembelajaran digital di sekolah dan madrasah.

Rincian dukungan K/L dalam Major Project RKP 2024 lebih lengkap disampaikan pada tabel 3.22.

Tabel 3.22
Dukungan sektor Agama, Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Major Project.

Major Project	Rincian Output	K/L	
Destinasi Pariwisata Prioritas	Warisan Budaya yang Dilindungi		
Pengelolaan Terpadu UMKM	Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha		
	Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	Kementerian Agama	
	Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	Kementerian Agama	
Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	Warisan Budaya yang Dilindungi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)		
Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
	Kajian dan Pengembangan Model Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON		
	Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan SEAMEO RECFON		
	Satuan PAUD yang Menerapkan Model Pembelajaran Bidang PAUD dan Parenting		
	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif		
	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS		
	SD yang Melaksanakan Program UKS		
	SMP yang Melaksanakan Program UKS		
	SMA yang Melaksanakan Program UKS		
	SMK yang Melaksanakan Program UKS		
	Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	Kementerian Agama	
	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya		
	Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah		
	Bimbingan Keluarga Kristiani		
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Bimbingan Keluarga Sukinah	Kementerian Agama	
	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia		
	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Major Project	Rincian Output	K/L
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	
	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	
	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	
	Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Kementerian Agama
	Siswa Madrasah MI Penerima PIP	
	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	
	Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	
	Siswa SMPTK Penerima PIP	
	Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	
	Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	
	Siswa Madrasah MA Penerima PIP	
	Siswa SDTK Penerima PIP	
	Siswa penerima PIP Tk Adi	
	Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik	
	Siswa penerima PIP Tk Madya	
	Siswa penerima PIP Tk Utama	
Siswa SMAK Penerima PIP		
Transformasi Digital	Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	Platform E-learning Madrasah yang Dikelola	Kementerian Agama
	Pojok Baca Digital di Daerah	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
	E-Journal yang Dilanggan	
	Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialihmediakan	

3.4 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2023

Musrenbangnas merupakan bentuk pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional. Target Pembangunan Nasional merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga harus dicapai oleh setiap pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan.

Musrenbangnas dilakukan sebagai media dalam penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota demi terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara sinergis antara Pusat dan Daerah.

Sebelum dilaksanakan Musrenbangnas, Pemerintah Pusat melaksanakan temu triwulanan yang difasilitasi oleh Bappenas dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) sebagai pemaparan awal Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, yang menjadi bahan diskusi pada Musyarawah Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Rakorbangpus 2023, dipaparkan secara umum arahan pembangunan pada tahun 2024. Setelah melalui berbagai forum konsultasi yang telah

dilaksanakan sepanjang triwulan pertama tahun 2023, tema RKP 2024 dirilis pada Rakorbangpus 2023 untuk menjadi dasar Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam menyusun program dan anggaran.

Musrenbangnas tahun 2023 masih dilaksanakan melalui media daring dengan pengusulan melalui sistem informasi KRISNA-SELARAS yang kemudian dibahas secara intensif melalui desk daring pada aplikasi pertemuan zoom dan diikuti oleh 34 Provinsi melalui daring. Pembahasan desk dilakukan per provinsi sekaligus membahas berbagai sektor-sektor yang menjadi prioritas masing-masing daerah. Sebelum dilaksanakan pembahasan, masing-masing daerah melalui Bappeda Provinsi diwajibkan mengisi usulan dan mengisi data dukung pada sistem informasi Krisna-Selaras.

Rangkaian Musrenbangnas menitikberatkan pada:

1. Pendalaman Major Project dan proyek-proyek prioritas (target, lokasi, dan kesiapan pelaksanaan) yang mendukung Prioritas Nasional yang telah diusulkan dalam Rakorgub 2023 dan Rakortekbang 2023 dengan status ditindaklanjuti;
2. Usulan baru terbatas dari Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi dan isu perkembangan daerah yang dianggap krusial untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Masukan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Musrenbang online adalah 20 usulan hasil tagging dan input Pemprov, yang terdiri dari:

1. Tagging hasil review Bappenas terhadap hasil pembahasan Rakorgub dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023, yaitu: usulan yang mendukung MP dalam Status Rekomendasi Ditindaklanjuti, untuk dilakukan pendalaman usulan berdasarkan status kesiapan (sudah diinput dalam KRISNA SELARAS);
2. Tagging hasil review Bappenas terhadap hasil pembahasan Rakortekrenbang 2023, yaitu: usulan daerah dengan Status Rekomendasi Ditindaklanjuti (sudah diinput dalam KRISNA SELARAS); Pemprov men-tagging maksimal 15 usulan terhadap hasil review dan seleksi Bappenas (total dari butir 1 dan 2) tersebut di atas.
3. Maksimum 5 (lima) usulan Baru dari hasil Musrenbang Provinsi atau forum perencanaan lainnya (yang akan diinput ke dalam sistem KRISNA SELARAS) dengan mempertimbangkan kondisi dan isu perkembangan daerah yang dianggap krusial dan merupakan kewenangan dan dilengkapi dengan kelayakan teknis dan kelayakan administrasi.

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Online diantaranya adalah:

4. Tindaklanjut pasca Musrenbangnas untuk menyepakati hal-hal yang masih dispute secara virtual dalam aplikasi KRISNA SELARAS;
5. Kesepakatan terhadap pencapaian target Indikator PN-PP-KP sesuai Tematik Topik;
6. Kesepakatan terhadap Rancangan Renja K/L sebagai pemutakhiran perbaikan target maupun perubahan lokasi sesuai kebutuhan pusat dan daerah;
3. Kesepakatan Usulan Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah yang diakomodir oleh K/L;
4. Catatan justifikasi/alasan usulan prioritas pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan PN-PP-KP-ProPN.

3.5 SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan PP 17 tahun 2017, tahapan setelah disusunnya Ranwal RKP adalah penyusunan pagu indikatif untuk memastikan penganggaran pada prioritas nasional untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan tema RKP 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus penganggaran adalah pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas SDM; penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job; mendorong pemulihan dunia usaha; revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; pembangunan rendah karbon dan transisi energi; percepatan pembangunan infrastruktur dasar; pembangunan Ibu Kota Nusantara. Fokus penganggaran juga berkait dengan akselerasi ekonomi untuk mengejar berbagai ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak aspek produktivitas dan ekonomi.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2024 dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (policy-driven), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (budget-driven) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

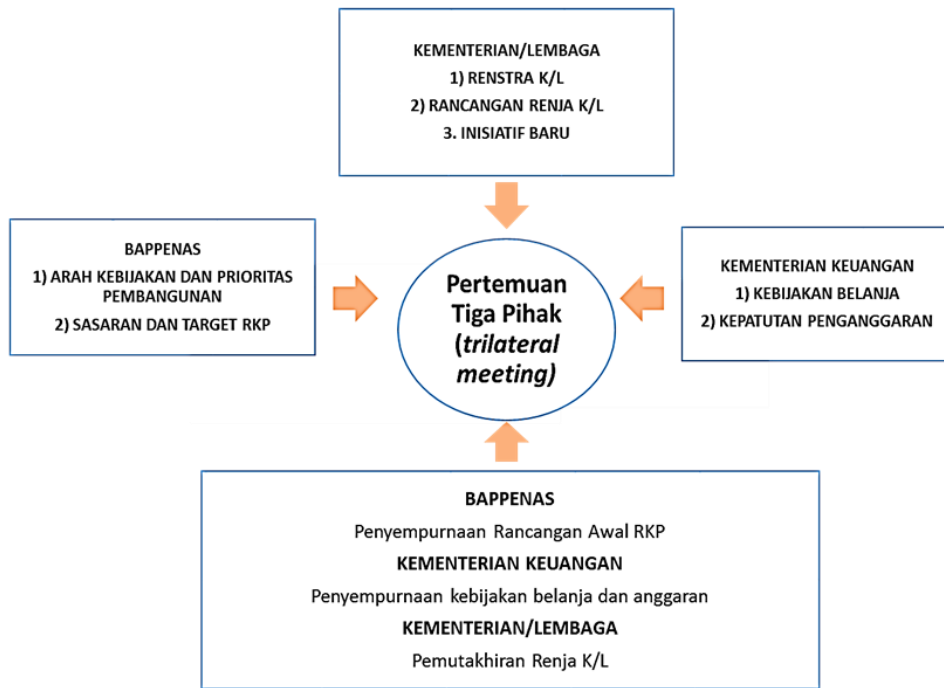
Kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2023 masih menggunakan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan money follows program, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan, dan output kegiatan yang mencerminkan real work atau konkret.

Dalam melakukan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pendanaan di tingkat pusat, dilakukan Pertemuan Tiga Pihak atau Trilateral Meeting (TM) antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga untuk membahas dan menajamkan prioritas nasional yang harus dipenuhi serta penganggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi target dalam RKP 2024. Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pasal 16 yang menyatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri/Pimpinan lembaga melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L. Pertemuan Tiga Pihak merupakan sebuah forum pembahasan bersama yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga guna melakukan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RKP dan Renja K/L.

Penelaahan Rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:

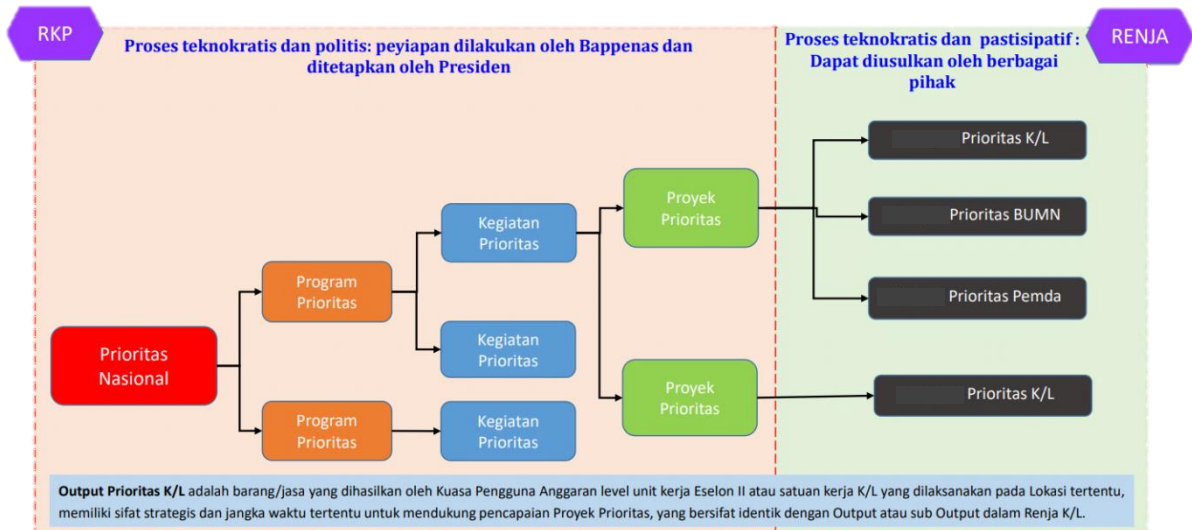
1. Menteri PPN terhadap Ketepatan Sasaran rancangan Renja K/L dengan RKP;
2. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara.

Adapun proses mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



GAMBAR 3.3 MEKANISME PERTEMUAN TIGA PIHAK SESUAI PP17/2017

Fokus pembahasan dalam *Trilateral Meeting* adalah terkait penajaman sasaran, target, lokasi dan rencana pendanaan program dan kegiatan prioritas termasuk pengakomodasian hasil pembahasan Musrenbangnas. *Trilateral Meeting* juga mendalami rincian output prioritas K/L yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Setiap output K/L yang mendukung Prioritas Nasional harus di-tagging kepada Proyek Prioritas Nasional yang didukungnya melalui aplikasi KRISNA.



GAMBAR 3.4 ALUR SINKRONISASI RKP DENGAN RENJA K/L

Peran Bappenas pada Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran antara lain:

- Menyusun Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas yang dirinci hingga Proyek Prioritas
- Mengintegrasikan pemanfaatan Belanja K/L, Belanja Non-K/L (Subsidi, PSO, Hibah Daerah), Dana Transfer Khusus, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya untuk pendanaan prioritas

Trilateral Meeting juga mendalami terkait:

- Kegiatan Prioritas 2021 yang berlanjut terutama Multiyear Project
- Kegiatan Prioritas RKP 2024
- Mencakup sampai dengan tingkat Major Project
- Integrasi berbagai sumber pendanaan (swasta, KPBU, BUMN/D dan APBN/APBD)

Pelaksanaan Trilateral Meeting berdasar pada Surat Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait Pagu K/L. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) mitra, dilaksanakan dua tahap *Trilateral Meeting* yang terdiri dari TM Pagu Indikatif (PI) dan TM Pagu Anggaran (PA) yang masing-masing dilaksanakan segera setelah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan. Pemanfaatan belanja K/L pada masing-masing pagu yang telah ditetapkan dalam SB dibahas lebih lanjut di dalam TM.

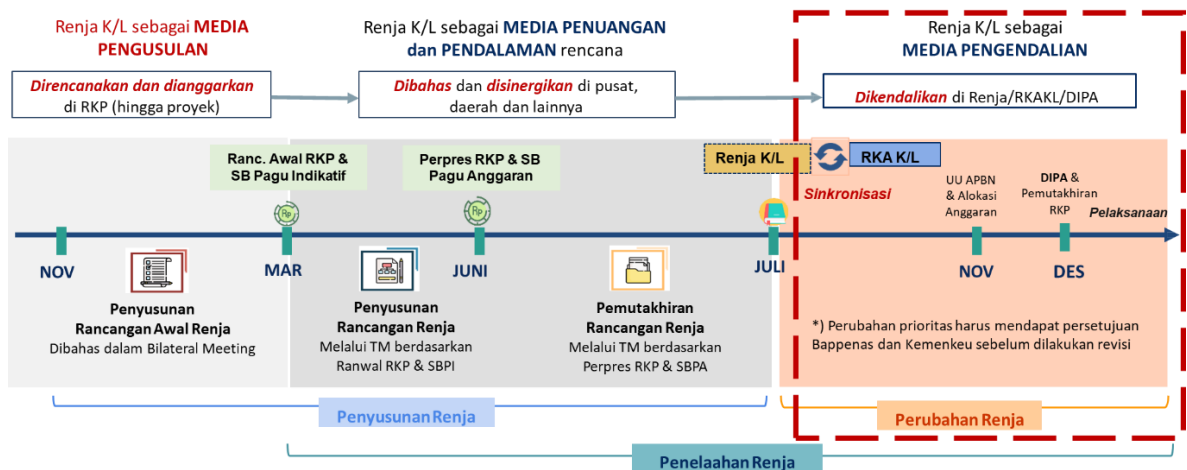
Melalui *Trilateral Meeting* disepakati:

1. Pagu per program berdasarkan belanja operasional dan non operasional
2. Pendalaman Per Program, termasuk Target dan pendanaan per output, Anggaran pendidikan, Tagging Prioritas Nasional, Lokus.

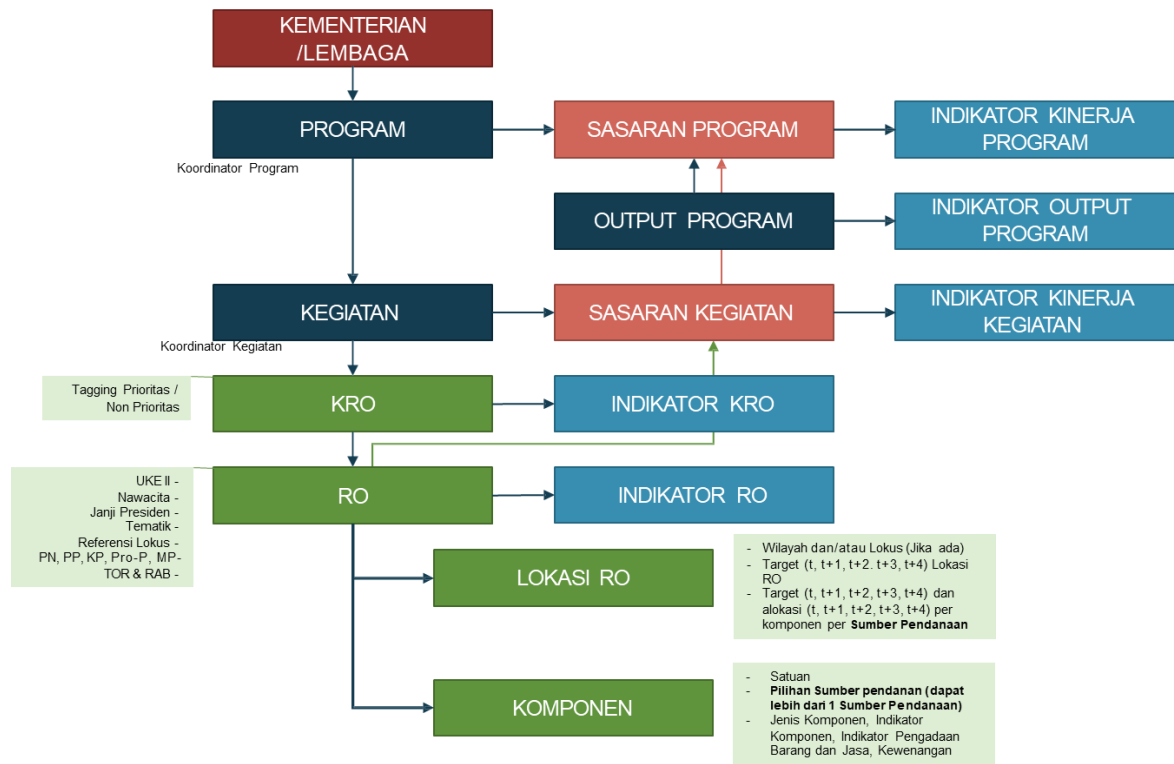
Catatan Hasil Trilateral Meeting kemudian menjadi dasar dalam penelaahan Renja K/L mitra yang dilakukan melalui Sistem Aplikasi Krisna-Renja. Pencatatan hasil pertemuan tiga pihak pada tahun 2021 menggunakan pola baru yaitu secara online pada sistem informasi Krisna. Beberapa hal yang menjadi perhatian penelaah dalam menilai Renja K/L antara lain:

1. Penilaian Administratif, terdiri dari KAK, RAB, dan/atau Dokumen Khusus
2. Penilaian Kelayakan, terdiri dari:
 - Konstruksi: Kelayakan Teknis, finansial dan/atau ekonomi, sosial, lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan/atau kesesuaian dengan karakteristik bidang terkait.
 - Non-konstruksi: Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Sosial.

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 3.5 Peran Renja K/L dalam perencanaan pembangunan



GAMBAR 3.6 STRUKTUR RENJA K/L MELALUI APLIKASI KRISNA RENJA

Penelaahan rancangan Renja K/L berpedoman pada:

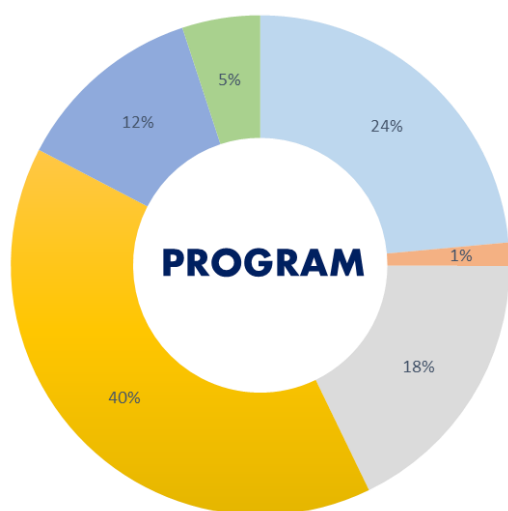
1. Renstra K/L;
2. Rancangan RKP;
3. Surat Bersama Pagu Anggaran;
4. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Pembangunan Nasional;
5. Kebijakan Presiden;
6. Dokumen kelayakan dan kesiapan kegiatan (KAK/TOR, RAB, dan FS); dan
7. Dokumen pendukung lainnya;

Tindakan lanjut yang disepakati pada saat *Trilateral Meeting* adalah untuk K/L menyampaikan :

1. Pemutakhiran lampiran A (per-program), B (output prioritas), dan C (proyek prioritas);
2. Indikasi kebutuhan tambahan (dengan target kebutuhan tambahan yang terukur).

3.5.1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2024

A. Pagu Indikatif Kemendikbudristekristek 2024



- WA - Program Dukungan Manajemen
- DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
- DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- DK - Program Pendidikan Tinggi
- DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- DL - Program Pendidikan Vokasi

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif TA 2024, disampaikan Pagu Indikatif Kemendikbudristek adalah sebesar Rp. 80,21 Triliun yang berasal dari berbagai sumber pendanaan. SB Pagu Indikatif juga mengamankan beberapa prioritas yang dituangkan dalam catatan kaki lampiran A maupun daftar RO Prioritas di lampiran B. Penekanan RO Prioritas pada Lampiran B berfungsi untuk menjaga keberlangsungan berbagai RO yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Pada pertemuan tiga pihak, Kemendikbudristek melalui Biro Perencanaan memaparkan Prioritas Utama Kemendikbudristek tahun 2023 adalah untuk percepatan penyelesaian program unggulan Mendikbudristek seperti Platform Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kemendikbudristek mengalihkan sebagian alokasi PN pada SBPI seperti KIP Kuliah dan aneka tunjangan guru non PNS yang sudah beralih status menjadi P3K daerah, dimana gaji dan tunjangannya pada 2023 akan dibayarkan oleh daerah.

Proses Perencanaan dan Penganggaran pada Kemendikbudristekristek untuk tahun anggaran 2023 masih menghadapi cukup banyak tantangan, diantaranya adalah kebutuhan penganggaran pada program-program andalan Mendikbudristek yang sangat besar menyebabkan tidak sampainya kesepakatan pada nominal anggaran tambahan yang layak untuk dipenuhi.

Postur Pagu Indikatif per Program dan Renja K/L Kemendikbudristek TA 2024

Program	PAA 2023	RKA 2023	SBPI 2024	Renja K/L PI TA 2024	Selisih PI '24 - PAA '23	Selisih PI '24 - RKA '23
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	80,221,010	80,221,010	81,785,757	81.785.757	1,564,747	1,564,747
023.WA-Program Dukungan Manajemen	19,314,428	19,837,948	19,253,195	19.710.287	(61,233)	(584,753)
023.DH-Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1,166,370	1,282,655	1,235,296	1.741.726	68,926	(47,359)
023.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	12,765,672	14,818,625	14,531,942	13.579.998	1,766,270	(286,683)
023.DK-Program Pendidikan Tinggi	32,937,834	31,527,253	32,564,081	32.479.898	(373,752)	1,036,828

023.DF-Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10,087,918	8,708,497	10,066,755	10.134.407	(21,163)	1,358,258
023.DL-Program Pendidikan Vokasi	3,948,788	4,046,032	4,134,487	4.139.441	185,699	88,455

Pembahasan pada Pagu Indikatif Kemendikbudristek TA 2024:

- 1) Kemendikbud Perlu memastikan dan mengamankan penganggaran wajib seperti belanja operasional pegawai (001) dan belanja non operasional berkarakteristik operasional (004)
- 2) Usulan Kemendikbud yang perlu dibahas lebih lanjut:
 - Kenaikan unit cost dan sasaran PIP jenjang pendidikan menengah
 - Bantuan operasional/bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri, termasuk Matching Fund dan Competitive Fund;
 - Aneka tunjangan guru, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan guru besar non-PNS, dan peningkatan mutu SDM Pendidikan tinggi;
 - Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, afirmasi pendidikan menengah (ADEM), Pendidikan inklusif, perencanaan pendidikan berbasis data, pelaksanaan akreditasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 - Peningkatan target sertifikasi guru;
 - Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi, Program Kampus Merdeka;
 - Program SMK Pusat Keunggulan, pendidikan kecakapan kerja dan kewirausahaan, peningkatan uji kompetensi bagi siswa SMK, SDM pendidik dan mahasiswa PT Vokasi; dan BOPTN PT Vokasi;
 - Pengembangan literasi, kebahasaan dan kesastraan; dan
 - Pengembangan MTN bidang Seni Budaya.
 - Kenaikan Kebutuhan tambahan yang muncul akibat amanat peraturan perundangan, misalnya Perpres Pembangunan Papua, UU IKN, dsb
- 3) Kemendikbud agar menyiapkan dokumen dan data pendukung usulan tambahan anggaran yang valid, dan akan dibahas dalam pendalaman teknis di masing-masing Unit Utama.

B. Usulan Tambahan

Kemendikbud mengusulkan usulan tambahan melalui surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan tanggal 19 Juni 2023 perihal Usulan Tambahan Anggaran TA 2024. Berdasarkan Surat, usulan tambahan yang diajukan adalah sebesar Rp. 17,00 Triliun. Usulan tambahan tersebut dipenuhi melalui surat Menteri Keuangan yang kemudian ditetapkan dalam SB Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2024.

Tambahan Anggaran Kemendikbudristek TA 2024

Unit Utama / Program	Usulan (Rp. Juta)	Dipenuhi (Rp. Juta)	Rencana Pemanfaatan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	17.005.866.019		
Sekretariat Jenderal	4.928.507.006		
DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	3.855.266.558	3.855.266.558	1. Peningkatan Unit Cost PIP SMA/SMK menjadi Rp. 1,8juta

			per tahun. Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi di jenjang Pendidikan menengah atas. 2. Operasional SILN dan CLC
DK - Program Pendidikan Tinggi	1.000.000.000	0	
WA - Program Dukungan Manajemen	73.240.448	0	Penguatan ULT (CS) dan LLDikti wilayah XV
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	341.786.420		
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	75.000.000		
WA - Program Dukungan Manajemen	266.786.420		
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	189.194.273		
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	189.194.273		Penyelesaian Backlog akreditasi satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	422.605.710		
DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	278.187.841		
WA - Program Dukungan Manajemen	144.417.869		
Ditjen Kebudayaan	1.213.500.000		
DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.156.500.000		
WA - Program Dukungan Manajemen	57.000.000		
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.157.064.976		
DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.102.165.927		Penambahan target Guru Penggerak sebanyak xxx orang guru.
WA - Program Dukungan Manajemen	54.899.049		Sarpras UPT Balai
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	5.750.000.000		
DK - Program Pendidikan Tinggi	5.750.000.000		
Ditjen Pendidikan Vokasi	2.003.207.634		
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.993.207.634		
WA - Program Dukungan Manajemen	10.000.000		

C. Pagu Anggaran Kemendikbudristek 2024

Pada periode pagu anggaran, Kemendikbud mendapatkan tambahan anggaran melalui SB Pagu Anggaran. Tambahan anggaran dialokasikan sesuai dengan Surat Mendikbud tentang usulan tambahan anggaran. Namun Mendikbud kembali mengirimkan Surat No. XXXXX perihal... untuk menetapkan perubahan pemanfaatan anggaran tambahan beserta sebarannya pada Unit Utama dan program di dalamnya.

Pada tahap akhir pagu anggaran, Kemendikbud mengusulkan perubahan struktur Renja melalui beberapa perubahan Rincian Output dan komponen untuk memetakan kenaikan penganggaran ke dalam struktur yang tepat.

Beberapa usulan perubahan struktur renja adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen
Ditjen PAUD Dasmen mengusulkan berbagai komponen baru yang merincikan struktur Merdeka Belajar sesuai dengan
2. Ditjen Kebudayaan
RO baru terkait
3. Ditjen GTK
Ditjen GTK memiliki permasalahan terkait pengusulan angka kredit guru yang dilaksanakan oleh UPT BBGP. Sebelumnya, ada di 1 RO sehingga Ketika kebutuhan ... revrevisi harus
4. Ditjen Vokasi
Tambahan anggaran pada Ditjen Vokasi adalah untuk pelaksanaan program Pemagangan Luar Negeri. Berdasarkan hasil penelaahan, konsep pemagangan yang diusung oleh Ditjen Vokasi masih belum matang. Hal ini memerlukan berbagai persiapan dan perkuatan baik di level kebijakan, regulasi sampai dengan pihak pelaksana. Sehingga masih perlu melengkapi kesiapan dokumen kajian, regulasi serta pendukung lainnya.

D. Pagu Alokasi Kemendikbudristek 2024

Pada Tahap Pagu Alokasi, Kemendikbudristek mendapatkan tambahan anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp. 1,28 Triliun, yang seluruhnya ada pada Program Dukungan Manajemen.

Pagu Alokasi kemudian disahkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L untuk disiapkan menuju Rancangan APBN Tahun 2024. Pada tahap pagu alokasi tidak banyak mengakomodasi perubahan-perubahan selain penambahan belanja pegawai. Pada tahap Pagu Alokasi difokuskan pada pemenuhan kelengkapan data dukung.

Tabel 3.23 Rincian Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 per Program per Tahap Penganggaran

Pagu per Program	Pagu Indikatif	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran
Kemendikbudristek	81.785.756.807	97.701.768.771	98.987.006.108
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10.134.406.716	13.989.673.274	13.989.673.274
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	13.579.998.092	15.819.856.361	16.364.873.350
Program Pendidikan Tinggi	-	38.574.534.930	38.784.778.714
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.741.726.393	3.064.683.448	2.974.357.468
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.139.440.707	6.014.144.408	6.014.144.408
Program Dukungan Manajemen	19.710.286.652	20.238.876.350	20.859.178.894
Kemendikbud (-dikti)	49.305.858.560	59.127.233.841	60.202.227.394

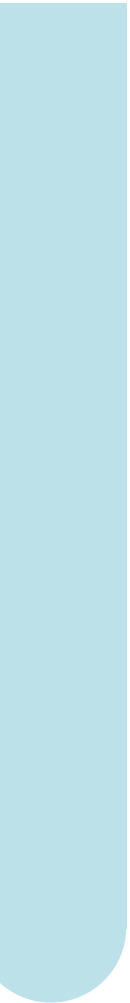
Tabel 3.24 Rincian Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 per Program per Tahap Penganggaran

UNIT ESELON 1	Pagu Indikatif	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran
Kemendikbudristek	49.305.858.560	97.701.768.771	98.987.006.108
Sekretariat Jenderal	21.901.326.156	42.432.340.630	43.225.845.905
Inspektorat Jenderal	203.060.992	203.060.992	204.603.589
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	2.523.912.697	2.784.905.964	2.784.905.964
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	992.070.060	1.092.262.402	1.182.588.382
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	589.748.495	1.002.378.357	1.007.392.086
Ditjen Kebudayaan	2.183.703.583	3.281.472.797	3.191.146.817
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.887.364.411	5.039.429.387	5.051.393.602
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	11.351.248.024	33.317.790.399	33.725.301.025
Ditjen Pendidikan Vokasi	6.673.424.142	8.548.127.843	8.613.828.738

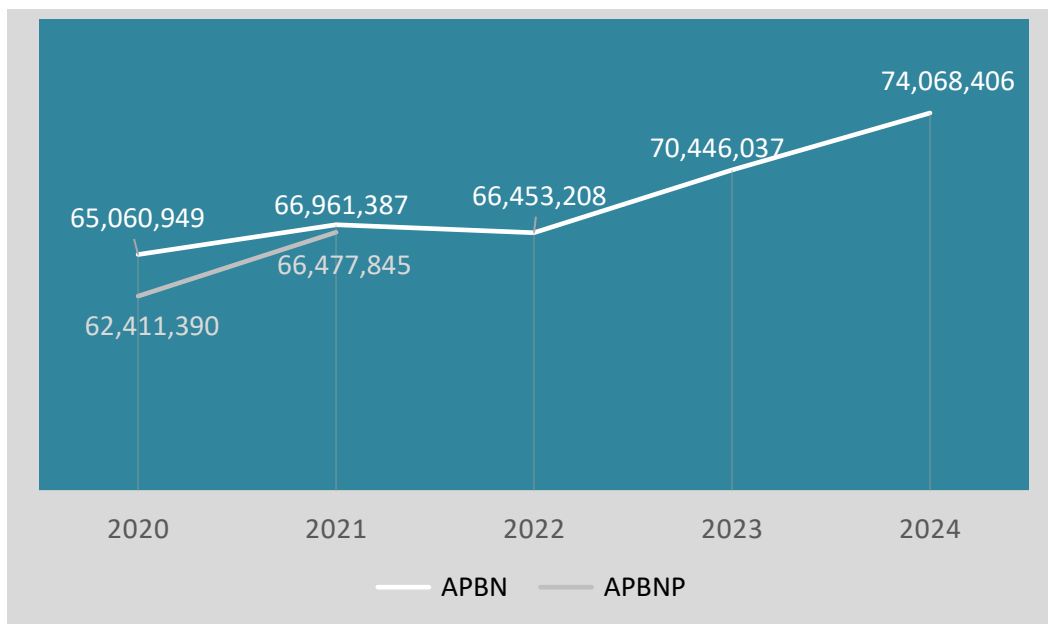
Tabel 3.25

Rincian Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 per Program per Unit Utama pada masing-masing Tahap Penganggaran

Unit Eselon 1	Program	Pagu Indikatif	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran
Sekretariat Jenderal	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	9.936.046.955	13.791.313.513	13.791.313.513
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	9.284.066.486	9.264.066.486	9.718.757.495
	Program Pendidikan Tinggi	-	16.605.121.855	16.815.365.639
	Program Dukungan Manajemen	2.681.212.715	2.771.838.776	2.900.409.258
Inspektorat Jenderal	Program Dukungan Manajemen	203.060.992	203.060.992	204.603.589
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	198.359.761	198.359.761	198.359.761
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.342.161.521	1.399.661.521	1.399.661.521
	Program Dukungan Manajemen	983.391.415	1.186.884.682	1.186.884.682
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	843.427.627	943.619.969	1.033.945.949
	Program Dukungan Manajemen	148.642.433	148.642.433	148.642.433
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	280.845.395	559.033.236	559.033.236
	Program Dukungan Manajemen	308.903.100	443.345.121	448.358.850
Ditjen Kebudayaan	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.460.880.998	2.505.650.212	2.415.324.232
	Program Dukungan Manajemen	722.822.585	775.822.585	775.822.585
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.110.342.458	4.212.508.385	4.212.508.385
	Program Dukungan Manajemen	777.021.953	826.921.002	838.885.217
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Program Pendidikan Tinggi	-	21.969.413.075	21.969.413.075
	Program Dukungan Manajemen	11.351.248.024	11.348.377.324	11.755.887.950
Ditjen Pendidikan Vokasi	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.139.440.707	6.014.144.408	6.014.144.408
	Program Dukungan Manajemen	2.533.983.435	2.533.983.435	2.599.684.330



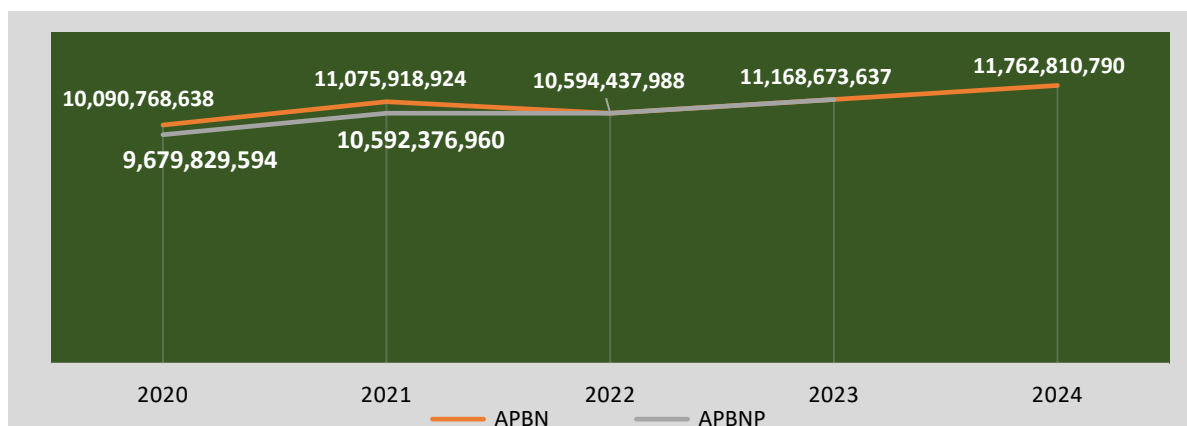
3.5.2 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2023



Gambar 3.7 Tren Anggaran Kementerian Agama tahun 2020-2024

Anggaran Kementerian Agama sejak 2020 sampai 2024 mengalami tren kenaikan, meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi yang juga berdampak pada penurunan anggaran fungsi agama, namun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 anggaran Kemenag mulai mengalami kenaikan.

Kenaikan anggaran Kementerian Agama sebagian besar adalah pada Fungsi Pendidikan, sedangkan Anggaran pada Fungsi Agama tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Anggaran fungsi agama di Kementerian Agama dari tahun ke tahun berkisar antara 15-17% dari total anggaran kementerian agama yang sudah termasuk didalamnya kenaikan 8% pada belanja gaji pegawai.

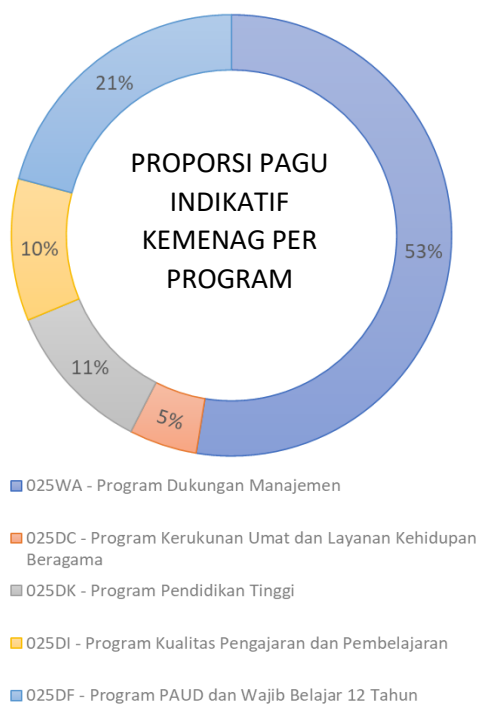


Gambar 3.8 Tren Anggaran Fungsi Pendidikan TA 2020-2024

Prioritas Penganggaran Kementerian Agama tahun 2024 adalah meneruskan Program Moderasi Beragama:

- Penguatan kebijakan masjid sebagai rumah ibadah yang sehat (e.g. sanitasi)
- Revitalisasi masjid sebagai pusat peradaban Islam (pendidikan, perbedayaan sosial ekonomi, literasi keagamaan)
- Kemitraan yang kuat terhadap distribusi/gerakan shodaqoh Al-Qurán kepada rumah tahfidz, daerah tertinggal, & masjid
- Revitalisasi pembinaan talenta muda - Qori sehingga berkontribusi penting dalam MTQ Nasional – Internasional; yg sejalan dengan roadmap manajemen talenta Nasional (MTN)
- Revitalisasi peran aktif penyuluh dalam rekonsiliasi konflik/kerukunan umat & program sosial lain (kemiskinan, penurunan stunting)
- Menimbang transisi kepegawaian P3K, perlu dipastikan ketepatan data sasaran Tunjangan Penyuluh non PNS
- Perlu ada pengembangan model Dialog Kerukunan Agama & Peningkatan Kompetensi Penyuluh sehingga dapat mencakup lebih besar sasaran baik dengan luring maupun hybrid
- Zakat & Wakaf Produktif masuk dalam salah satu Janji Presiden ☑ dipastikan ketercapaian target sampai akhir 2024
- Integrasi data sasaran mustahiq dengan Regsosek dan DTKS
- Konfirmasi Bantuan Operasional Baznas
- Sumber Pendanaan PNBPN pada RO Layanan Nikah Rujuk yang berpotensi tidak terpenuhi menimbang tren pernikahan yang menurun selama beberapa tahun terakhir, sementara Bimbingan Perkawinan merupakan Major Project dan salah satu Janpres.
- Gerakan Keluarga Maslahat perlu dimunculkan dalam dokumen TOR dan RAB serta dalam nomenklatur Komponen.
- Konfirmasi keputusan akhir terkait jasa profesi penghulu

A. Pagu Indikatif Kemenag 2024



Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif TA 2023, disampaikan Pagu Indikatif Kementerian Agama adalah sebesar Rp. XX,XX Triliun yang berasal berbagai sumber pendanaan. SB Pagu Indikatif juga mengamankan beberapa prioritas yang dituangkan dalam catatan kaki lampiran A maupun daftar RO Prioritas di lampiran B. Penekanan RO Prioritas pada Lampiran B berfungsi untuk menjaga keberlangsungan berbagai RO yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Pagu Indikatif Kemenag TA 2024 adalah Rp. 69,010,639,500,000. Apabila dibandingkan dengan RKAKL tahun 2024, PI Kemenag 2023 meningkat sebesar Rp. 2,5 Triliun, dengan komposisi Fungsi Pendidikan sebesar Rp55,885.5 Miliar atau meningkat dari PI tahun 2023 Rp 55,522.9 Miliar, sedangkan Fungsi Agama sebesar Rp10,611.8 Miliar atau menurun dari Rp11,150.5 Miliar dari PI tahun 2023.

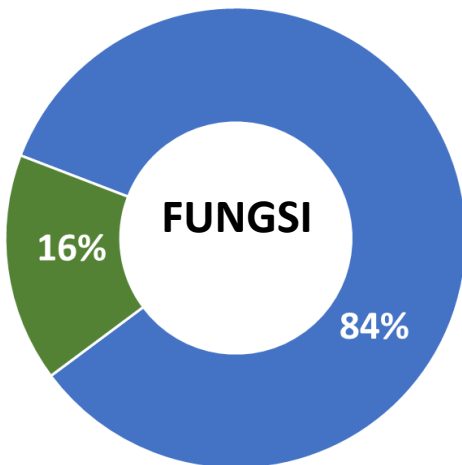
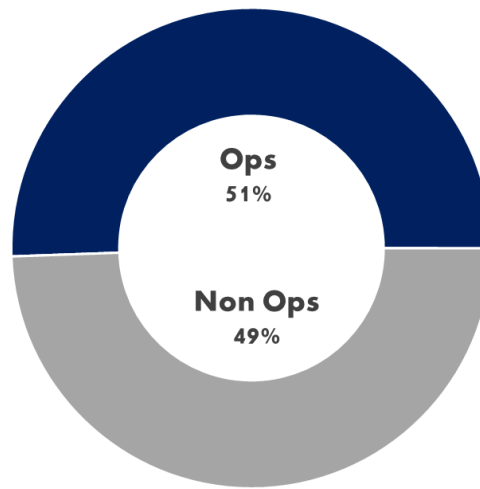
1. Kenaikan anggaran kementerian agama sebesar Rp. 1,7 Triliun, terdiri dari:
 - a) Fungsi Pendidikan meningkat Rp. 1,3 T
 - b) Fungsi Agama meningkat Rp. 392,3 M
2. Kenaikan Belanja Operasional sebesar Rp. 793,7 Miliar
3. Kenaikan Belanja Non Operasional Rp. 926,5 Miliar
4. Kenaikan belanja Non RM sebesar Rp. 1,28 Triliun
 - a) SBSN Rp. 524,9 Miliar
 - Fungsi Agama Rp. 167,7 Miliar
 - Fungsi Pendidikan Rp. 357,1 Miliar
 - b) PHLN Rp. 247,4 Miliar
 - c) RMP Rp. 57,8 Miliar
 - d) PNBP/BLU Rp. 450,5 Miliar

Pagu Indikatif Kementerian Agama

Program	Lamp A PAA 2023	RKA 2023	Lamp A SBPI 2024	Renja K/L (cutoff 8/4/2023)	Selisih (Lamp A SBPI 2024 – RKA 2023)
KEMENTERIAN AGAMA	70.446.036.880	70.446.036.880	72.166.256.4	89.232.192.352	1.720.219.538
025.WA - Program Dukungan Manajemen	37.179.430.262	37.179.430.262	37.935.124.16	45.051.107.556	755.693.899

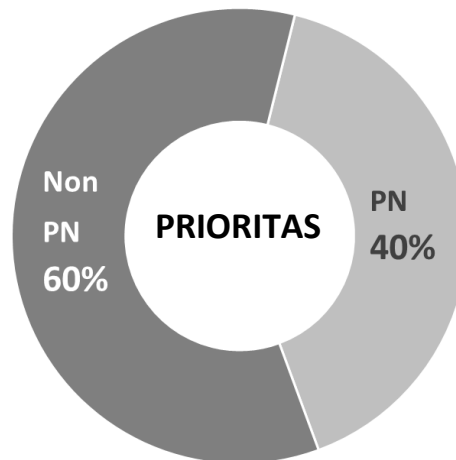
025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.430.323.794	3.430.323.794	3.599.070.106	5.935.971.301	168.746.312
025.DK - Program Pendidikan Tinggi	7.997.862.515	7.997.862.515	8.066.520.486	10.320.330.634	68.657.971
025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.248.283.915	7.248.283.915	7.511.082.299	9.318.403.940	262.798.384
025.DF - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.590.136.394	14.590.707.008	15.054.459.36	18.606.378.921	463.752.358

KEMENTERIAN AGAMA	72.166.256.418
Ops	36.494.481.977
Non Ops	35.671.774.441



KEMENTERIAN AGAMA	72.166.256.418
Fungsi Pendidikan	60.605.230.250
Fungsi Agama	11.561.026.168

KEMENTERIAN AGAMA	72.166.256.418
PN	29.222.087.182
Non PN	42.944.169.236



Gambar 3.9 Proporsi Belanja Kementerian Agama TA 2024

Pembahasan pada Anggaran Kementerian Agama Fungsi Agama

- 1) Total anggaran fungsi agama Kemenag dalam SBPI 2024 meningkat sebesar Rp. 313.758.260,- dari Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 11.247.294.858,-
- 2) Peningkatan anggaran pada fungsi agama:
 - Peningkatan Belanja Operasional
 - Peningkatan Belanja Non RM (SBSN layanan agama)
- 3) Usulan Kemenag yang perlu dibahas lebih lanjut:
 - Event keagamaan
 - Petugas haji professional
 - Pemenuhan target sertifikasi halal
 - Pengembangan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat
 - Kesiambungan pengukuran IKUB di Balitbang
- 4) Perlu dibahas terkait dampak reorganisasi Balitbangdiklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan penempatan dalam program yang tepat.
- 5) Perlu dipastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan pada akhir 2024, agar tidak ada luncuran di tahun berikutnya (misalnya SBSN)

Pembahasan pada Anggaran Kementerian Agama Fungsi Pendidikan

- 1) Total anggaran pendidikan Kemenag dalam SBPI 2024 meningkat sebesar Rp. 1.327.867.007.000,- dari Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 59.277.363.243.000,-
- 2) Peningkatan digunakan untuk:
 - Peningkatan belanja operasional pegawai
 - Peningkatan belanja Non RM
- 3) Pemetaan pagu belanja 004 dan peningkatannya dari tahun 2023
- 4) Usulan Kemenag yang perlu dibahas lebih lanjut:
 - Kenaikan berbagai tunjangan guru dan dosen, untuk menghindari tunjangan terhutang
 - Kebutuhan inpassing pada guru-guru yang sudah memenuhi syarat
 - Pemenuhan kebutuhan anggaran PIP \square perlu dibahas bersama Kemdikbudristek dan Kemensos mengenai penetapan sasaran PIP dari DTKS di masing-masing Kementerian
 - Penguatan pendidikan pesantren sebagai amanat UU Pesantren
 - Kebutuhan tambahan yang muncul akibat amanat peraturan perundangan, misalnya Perpres Pembangunan Papua, UU IKN, dsb
 - Implikasi usulan revisi TA 2023 (penyesuaian target dan alokasi) terhadap RO-RO PN
- 5) Kemenag perlu menyiapkan usulan tambahan anggaran disertai dengan dokumen dan data dukung yang valid, dan akan dibahas dalam pendalaman teknis di masing-masing Unit Utama.

B. Usulan Tambahan

Kementerian Agama mengusulkan usulan tambahan pada XXXXXXX. Namun, sampai dengan tenggat waktu penyusunan pagu berakhir, Kemenag belum menyampaikan data dukung yang disyaratkan oleh Kementerian keuangan, sehingga usulan tambahan anggaran Kementerian Agama belum dapat dipenuhi.

C. Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Kemenag 2024

Pada tahap Pagu Anggaran tidak ada perubahan pada renja Kementerian Agama. Namun pada tahap Pagu Alokasi, Kementerian agama mendapatkan anggaran operasional kenaikan gaji pegawai sebesar 8% sesuai dengan arahan presiden, namun tidak mendapatkan tambahan anggaran Non Operasional. Kenaikan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 1,9 Triliun bagi seluruh satker Kementerian Agama. Rincian kenaikan belanja pegawai pada masing-masing unit eselon 1 Kementerian Agama dapat dilihat dari tabel di samping.

Unit Utama	Tambahan Pagu Alokasi
Sekjen	1.719.893.708
Itjen	1.897.857
BimasIslam	1.605.633
Pendis	159.565.132
BimasKristen	3.858.821
BimasKatolik	683.787
BimasHindu	4.468.970
BimasBuddha	817.295
PHU	2.056.331
Balitbangdiklat	6.575.480
BPJPH	726.741
KEMENAG	1.902.149.755

Tabel 3.26
Rincian Anggaran Kementerian Agama tahun 2024 per tahap

Kode	Program	Renja K/L Pagu Indikatif	RKAKL Pagu Anggaran	Pagu Alokasi
025.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.599.070.106	3.599.070.106	3.599.070.106
025.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	15.052.159.366	15.054.459.366	15.054.459.366
025.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.356.034.988	7.511.082.299	7.511.082.299
025.DK	Program Pendidikan Tinggi	8.213.851.691	8.066.520.486	8.066.520.486
025.WA	Program Dukungan Manajemen	37.945.140.267	37.935.124.161	39.837.273.916
	TOTAL	72.166.256.418	72.166.256.418	74.068.406.173

D. Pending Issues

Pada pembahasan Renja K/L TA 2024 pada Kementerian Agama, Terdapat beberapa issue yang belum terselesaikan khususnya terkait beberapa prioritas yang penganggarannya belum dapat dipenuhi secara utuh, antara lain;

- 1) Peningkatan unit cost PIP pada Jenjang Pendidikan menengah (SMA dan SMA) belum terakomodir pada satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama
- 2) Pemenuhan Unit Cost BOS Majemuk belum mencukupi untuk seluruh siswa di Satuan Pendidikan di bawah Direktorat PD. Pontren.
- 3) Belum tersedianya hasil
- 4) XXXXXXXXXXXXXXXX
- 5) Perlu pendalaman lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Prioritas Menteri Agama Digitalisasi Madrasah dan Pesantren, serta melakukan reuiu dari hasil pelaksanaan tahun pertama di 2023. Ini akan menjadi dasar Penyusunan baseline tahun 2025.

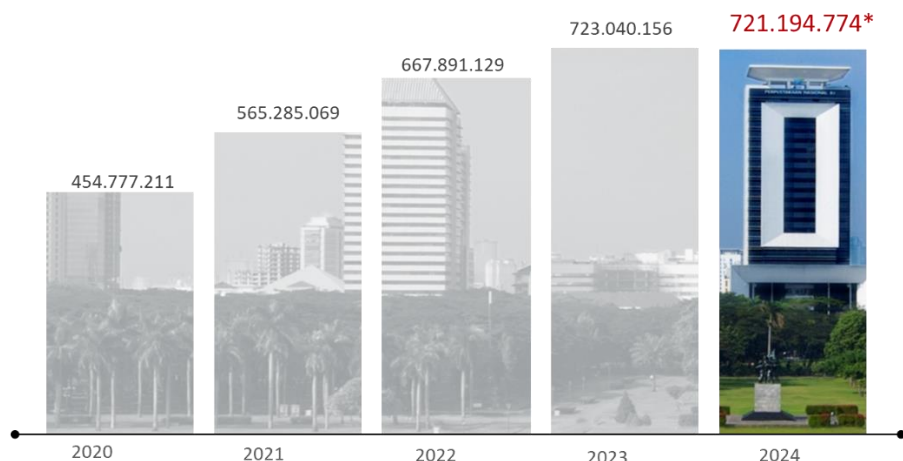
Tabel 3.27

Rincian Anggaran Kemendikbudristek TA 2024 per Program per Unit Utama pada masing-masing Tahap Penganggaran

UNIT UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN
Sekretariat Jenderal	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	86.671.070.000	86.671.070.000
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	13.959.719.000	13.959.719.000
	Program Dukungan Manajemen	30.790.830.583.000	32.470.724.291.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.857.196.203.000	1.857.196.203.000
	Program Dukungan Manajemen	462.017.808.000	463.623.441.000
Ditjen Pendidikan Islam	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.902.461.651.000	14.900.161.651.000
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.279.283.821.000	7.124.236.510.000
	Program Pendidikan Tinggi	7.596.530.427.000	7.704.054.402.000
	Program Dukungan Manajemen	4.833.903.345.000	5.033.484.583.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	190.127.498.000	190.127.498.000
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	57.799.463.000	57.799.463.000
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	70.735.192.000	70.735.192.000
	Program Pendidikan Tinggi	251.485.569.000	267.920.508.000
	Program Dukungan Manajemen	218.930.306.000	222.789.127.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	92.888.866.000	92.888.866.000
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	32.735.964.000	32.735.964.000
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	78.524.618.000	78.524.618.000
	Program Pendidikan Tinggi	62.204.007.000	62.204.007.000
	Program Pendidikan Tinggi	62.204.007.000	62.204.007.000
	Program Dukungan Manajemen	74.712.006.000	75.395.793.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	88.203.931.000	88.203.931.000
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	32.468.162.000	32.468.162.000

UNIT UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	35.199.785.000	35.199.785.000
	Program Pendidikan Tinggi	125.980.591.000	149.352.882.000
	Program Dukungan Manajemen	170.578.408.000	175.047.378.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.203.464.000	50.203.464.000
	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	28.994.126.000	28.994.126.000
	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.379.164.000	33.379.164.000
	Program Pendidikan Tinggi	30.319.892.000	30.319.892.000
	Program Dukungan Manajemen	60.256.097.000	61.073.392.000
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	956.081.744.000	956.081.744.000
	Program Dukungan Manajemen	420.794.196.000	422.850.527.000
Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	Program Dukungan Manajemen	663.633.827.000	680.209.307.000
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	277.697.330.000	277.697.330.000
	Program Dukungan Manajemen	62.253.760.000	62.980.501.000

3.5.3 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023



*) Pagu Indikatif TA. 2024

Berdasarkan tren pertumbuhan anggaran, anggaran Perpustakaan cenderung mengalami kenaikan yang stabil, kecuali pada tahun 2024 yang mengalami sedikit penurunan. Dalam mendukung penyelenggaraan perpustakaan yang handal dan sesuai kebutuhan zaman, memerlukan Teknologi yang lebih mutakhir untuk dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kebutuhan untuk memenuhi teknologi perpustakaan membutuhkan anggaran yang cukup banyak, namun anggaran Perpustakaan pada fungsi diluar pendidikan Terdapat kecenderungan terus mengalami penurunan, sedangkan anggaran Pendidikan terus meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, selama beberapa tahun terakhir, Perpustakaan Nasional mengusulkan seluruh Alokasi Perpustakaan Nasional menjadi fungsi Pendidikan. Perpustakaan Nasional perlu menyusun kajian potensi dan dampak dari pemanfaatan anggaran Pendidikan secara utuh di Perpustakaan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pengusulan revisi terhadap Undang-Undang Perpustakaan No. 43 tahun 2007. Mengingat pentingnya literasi bagi Pendidikan Indonesia, hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pendidikan pada tahun selanjutnya.

Kebijakan Kepala Perpustakaan Tahun 2024:

1. Peningkatan Kualitas dan kompetensi ASN Perpustakaan dibidang TIK;
2. Alokasi iuran keanggotaan organisasi bidang perpustakaan internasional (spt, SEAPAVA, WorldCat; ISBN)
3. Penambahan alokasi bandwidth untuk mempermudah akses perpustakaan kepada masyarakat
4. Penambahan alokasi anggaran untuk penambahan daya listrik bagi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno untuk memenuhi kebutuhan fasilitas layanan Gedung baru
5. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga perpustakaan dilakukan dalam bentuk kegiatan advokasi dan supervisi pengembangan perpustakaan terutama pada perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi

A. Pagu Indikatif Perpustakaan 2024

Berdasarkan Surat Bersama Menkeu No. S-287/MK.02/2023 dan MenPPN/Bappenas No. 292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023, Pagu Indikatif Belanja Perpustakaan Nasional TA. 2024 adalah sebesar Rp. 721.194.774.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional Pegawai/Gaji dan Tunjangan (001) = **Rp. 143.455.013.000**
2. Belanja Operasional Barang/pemeliharaan dll (002) = **Rp. 61.820.061.000**
3. Non Operasional **Rp. 515.919.700,000** (Termasuk PNBPN) = **Rp. 487.463.000**
4. Program Perpustakaan dan Literasi di dalamnya termasuk indikator Prioritas Nasional **Rp. 379.750.470.000**

B. Usulan Tambahan

Perpustakaan Nasional mengajukan usulan tambahan untuk pemeliharaan di Biro SDM dan Umum Perpustakaan Nasional karena adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Belanja Operasional Belanja Barang di Perpustakaan Nasional dialokasikan sebesar Rp. 44.784.758.000, yaitu turun Rp. 13 Miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 58.098.572.810. Terdapat kebutuhan tambahan sebesar 13.313.814.810.

C. Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Perpustakaan 2024

Pada tahap Pagu Alokasi, Perpustakaan mendapatkan tambahan anggaran untuk kenaikan belanja pegawai sebesar Rp. 4,6 Miliar. Penambahan anggaran untuk kenaikan gaji pegawai sebesar 8% didasari oleh hasil Sidang Paripurna pembahasan RUU APBN.

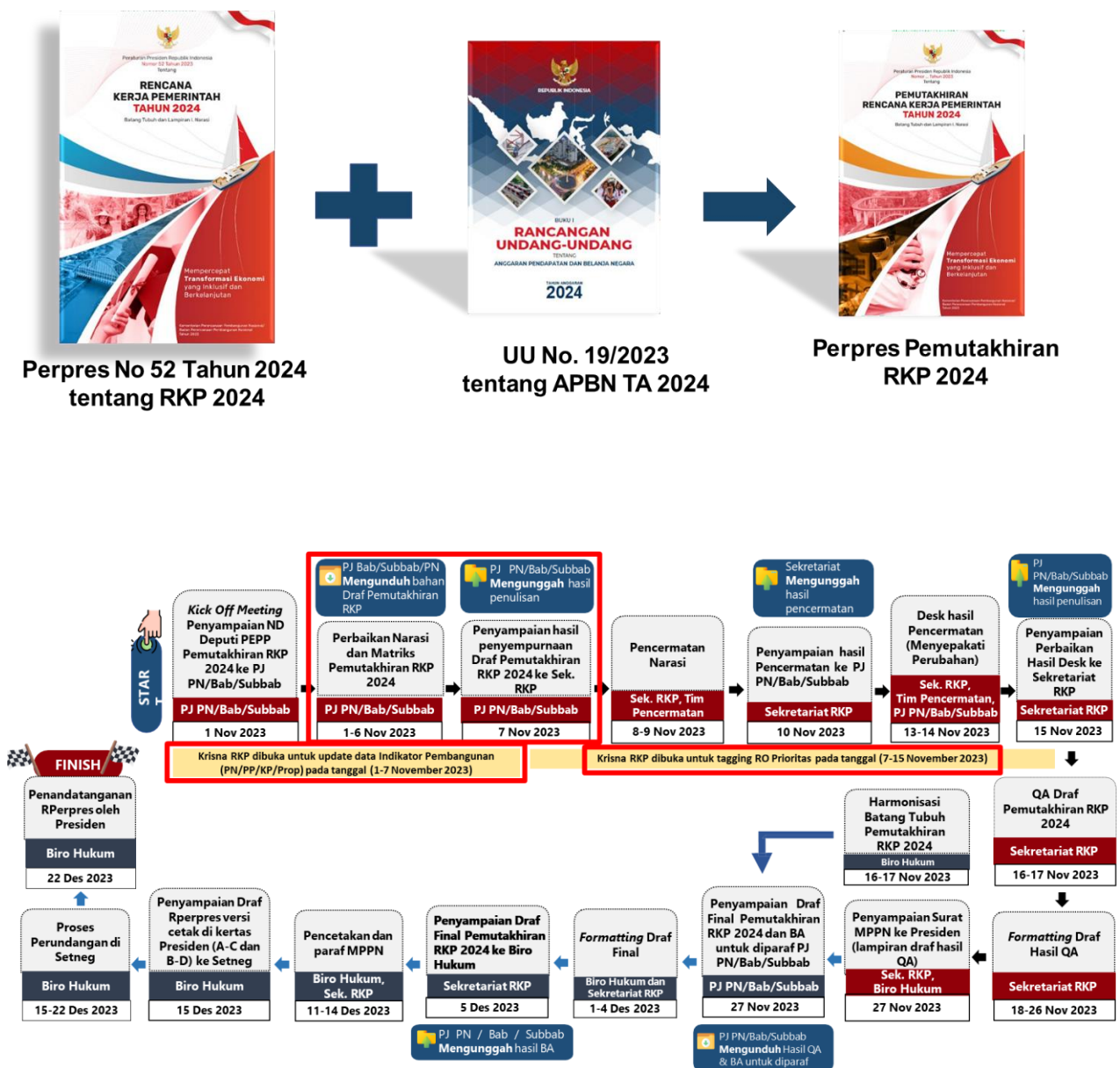
Tabel 3.28
Alokasi Anggaran Perpustakaan Nasional TA 2024

Kode	Program	Alokasi
057.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	463.755.298
057.WA	Program Dukungan Manajemen	257.439.476
Perpusnas		721.194.774

3.6 Pemutakhiran RKP 2024

Pemutakhiran berdasarkan PP 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses XXX dan dan PermenPPN No. 05 tahun 2018 tentang Tata Caca Penyusunan RKP mengamanatkan Pemutakhiran RKP pada akhir tahun perencanaan sesuai dengan UU APBN yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pemutakhiran RKP mencakup Pemutakhiran Narasi RKP dan Daftar Proyek Prioritas (terdiri dari Matriks Pembangunan dan Matriks Major Project).

Pemutakhiran RKP dilakukan pada triwulan IV tahun perencanaan, yaitu pada bulan Oktober s.d. November 2023. Proses pemutakhiran Matriks Pembangunan dilakukan langsung melalui modul sinkronisasi Krisna-Sakti berdasarkan data RKAKL yang ditetapkan melalui APBN. Seluruh proses dilakukan pada sistem informasi Krisna Renja K/L 2024 yang telah di-Sync dengan Sakti RKAKL, kemudian ditarik ke dalam Krisna RKP 2024 untuk menjadi Lampiran Perpres Pemutakhiran RKP. Berikut pembagian peran masing-masing pihak dalam tahapan pemutakhiran RKP.



Gambar 3.10 Timeline pemutakhiran RKP 2024

Tahapan pemutakhiran rkp pada system informasi KRISNA :

1. Penyesuaian sasaran dan indicator pada Krisna RKP
2. Sinkronisasi Renja dan RKA K/L → Modul Sinkronisasi
3. Penarikan data Krisna Renja ke Krisna Pagu
4. Proses tagging proyek pada Krisna RKP
5. Penyesuaian sasaran dan indicator pada Krisna RKP

Ruang lingkup pemutakhira rkp:

1. Pemutakhiran Narasi RKP 2024 berdasarkan UU APBN
2. Update data dan informasi pada narasi dan matriks
3. Memastikan cascading PN-PP- KP-ProP, termasuk melengkapi metadata indikator
4. Pendalaman Struktur Major Project hingga RO

Metodologi penulisan Perpres Pemutakhiran RKP

1. Batang Tubuh Perpres
2. Lampiran I
3. Matriks Pembangunan → PN/PP/KP/ProP, Sasaran, Indikator, Dukungan Terhadap Arahan Presiden. Target, Alokasi, dan Instansi Pelaksana
4. Matriks Major Project → Matriks Major Project, Major Project, Sub MP, Aspek Proyek, Ro/Proyek

Beberapa yang harus dipastikan dalam pemutakhiran RKP:

- Masing-masing RO Prioritas Nasional di-tagging pada PN PP KP ProP serta MP yang tepat.
- Ketepatan tagging tematik:
- Fungsi Pendidikan ditagging pada 05 - Anggaran Pendidikan
- RO Pendukung MP “Stunting” ditagging pada 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting
- Kelengkapan setiap Informasi Kinerja yang menjadi dasar penilaian Kinerja K/L pada berbagai platform penilaian, NKA, IPPN, serta penilaian kinerja lainnya. Kelengkapan Informasi Kinerja antara lain:
 - ✓ Kesesuaian matriks kinerja dan pendanaan dengan kaidah penyusunan struktur data dan Informasi Renja K/L
 - ✓ Setiap Sasaran dan Indikator Kinerja K/L telah diturunkan dengan lengkap, dan saling berkait melalui tagging sasaran;
 - ✓ Setiap unit eselon 1 memiliki IKSP masing-masing sebagai dasar perhitungan kinerja unit eselon 1;
 - ✓ Setiap RO harus ter-tagging pada IKK, SK → IKP, SP → IKSS, SS yang tepat sesuai dengan Renstra yang berlaku, termasuk pada berbagai RO baru yang diusulkan pada periode perencanaan TA 2024.

Beberapa kendala dalam penyusunan pemutakhiran RKP adalah terbatasnya waktu yang tersedia dalam proses pemutakhiran RKP 2024 sehingga proses koordinasi antara Bappenas Sektor dan K/L menjadi tidak maksimal. Kendala yang cukup besar dirasakan pada sistem informasi baik Krisna maupun Sakti yang belum sepenuhnya siap dalam menampung sinkronisasi Renja-RKA.



IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan serangkaian diskusi, pertemuan, dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga mitra kerja, Kementerian/Lembaga lain, Bappeda dan SKPD, serta pihak lain yang terkait dalam rangka penyusunan prioritas bidang agama, pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2023 dan isu-isu strategis bidang agama, pendidikan dan kebudayaan lainnya sepanjang tahun 2022.

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan turut berpartisipasi aktif dalam berbagai acara perencanaan, seperti Rakorgub, Rakorbangpus, Rakortek, Musrenbang Provinsi (sebagai LO Provinsi), Musrenbang Nasional, Forum Konsultasi Publik dan Daerah, serta rapat kerja dengan legislatif. Melalui kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan, telah dirumuskan arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan indikator capaian pembangunan nasional bidang agama, pendidikan dan kebudayaan serta sinkronisasinya terhadap penganggaran Kementerian/Lembaga.

-

4.2 SARAN

Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, yakni pemerintah pusat yang terdiri dari Kemenkeu, Bappenas dan K/L mitra, serta pemerintah daerah dan SKPD terkait. Perumusan indikator pembangunan dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah melalui kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas (Rakorgub), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Bilateral Meeting, Trilateral Meeting, dan Multilateral Meeting.

Secara keseluruhan, koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan secara baik oleh seluruh stakeholder. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal. Agar kegiatan koordinasi kedepannya lebih baik, berikut saran ataupun masukan terkait pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran:

1. Pada Penyusunan dokumen RKP
 - a. Penyusunan metadata perencanaan bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Penyusunan definisi operasional sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati Bersama dengan K/L selaku pemilik data.
2. Dalam penyelarasan dan sinkronisasi RKP dengan Renja K/L
 - a. Pada mekanisme sinkronisasi system perencanaan dan penganggaran Krisna-Sakti, perlu menambahkan fitur TOR dan RAB pada masing-masing RO
 - b. Untuk menjaga pemutakhiran TOR dan RAB
3. Dalam Penelaahan Renja K/L
 - a. Penguatan koordinasi pada tahap perencanaan untuk meminimalisasi potensi revisi pada tahap pelaksanaan yang dapat menghambat proses realisasi
 - b. Penguatan peran K/L dalam melakukan *Background Study* dan evaluasi dampak yang dapat mendukung berbagai pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran. K/L sebagai juga harus dapat menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Menginisiasi pengusulan dan penganggaran RO Prioritas berbasis pada hasil kajian

4. Dalam pemantauan dan pengendalian hasil kegiatan
 - a. Perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian dengan lebih intensif kepada Kemendikbudristek khususnya dalam mengelola tambahan anggaran dan berbagai inisiasi baru yang akan diselesaikan pada 2024. Hal ini perlu menjadi substansi tambahan pada pemantauan triwulanan, agar kapasitas pelaksanaan anggaran tambahan di Kemendikbudristek dapat dipantau secara berkala.
 - b. Pada pemantauan triwulanan juga perlu dilakukan pemantauan terhadap Major Project khususnya bagi LRO yang ditagging menjadi pendukung PN dan MP Kewilayahan.



LAMPIRAN



REKAPITULASI HASIL MUSRENBANGNAS

LEVEL	PROVINSI	USULAN	APPROVAL	VOL	SATUAN	CATATAN_APPROVAL
023 - KEMEN-DIKBUD-RISTEK						
PN		03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
PP		04 - Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas				
KP		01 - Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				
ProP		01 - Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif				
Usulan	12 - Provinsi Sumatera Utara	0004 - Penyelarasan kurikulum kompetensi keahlian vokasi SMA (Link and Match)	Tidak Terbahas	1	Kegiatan	
Usulan	65 - Provinsi Kalimantan Utara	0019 - Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah menengah Atas penguatan SMA Penggerak	Diakomodir	67	SMA	Kementerian PPN/Bappenas (Dit. APK) : - RO untuk di Tahun 2023 sudah dianggarkan. - Dapat berkoordinasi dengan Kemendikbud Pemerintah Daerah : - SMA Penggerak yang diusulkan sebanyak 67 unit dengan permintaan untuk pembinaan kelembagaan dan manajemen yang dilakukan oleh Kemendikbud. Dapat diakomodir dengan catatan menyiapkan syarat proposal yang dibutuhkan.
Usulan	91 - Provinsi Papua Barat	02 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Diakomodir	3	dokumen	Diakomodir. Puslapdik: - sudah melalui afirmasi pendidikan. sudah melalui proses pendaftaran dan seleksi. Kemendikbudristek: - untuk tahun 2023, masih mengalokasikan RO kurikulum yang dikembangkan dan masuk ke dalam PN, namun untuk intervensi Papua Barat masih belum diketahui. - kurikulum sebaiknya berbasis pada local wisdom.
KP		02 - Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun				
ProP		01 - Sarana dan Prasarana Pendidikan				
Usulan	36 - Provinsi Banten	0019 - Bidang Fisik	Ditolak	205	SD	Kesepakatan: Ditolak dengan catatan diusulkan melalui mekanisme perencanaan DAK dengan mempertimbangkan arah kebijakan, bidang, menu dan lokpri DAK Tahun 2023 Bappeda: usulan pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan pasca gempa tahun 2021 di Pandeglang. Bappenas (Dit. TRPB): usulan ini ada R3P, apabila diusulkan melalui R3P dana bisa melalui dana hibah RR. BNPB: usulan pasca bencana biasanya diarahkan ke pendanaan hibah namun harus menyusun dokumen R3P terlebih dahulu. tidak menggunakan pendanaan reguler tapi menggunakan dana cadangan bencana. dana cadangan bencana tidak termasuk dalam Renja BNPB. disini kami ada lokasi di selat sunda, salah satunya di Provinsi Banten. nama kegiatannya "Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik" dilaksanakan di 7 provinsi yang mengalami bencana masif. biasanya ke sektor

LEVEL	PROVINSI	USULAN	APPROVAL	VOL	SATUAN	CATATAN_APPROVAL
						perumahan. berdasarkan data, kami belum berkoordinasi dengan unit kerja untuk pemulihan perumahan melalui dana RR. info dari unit kerja, pemulihan pasca bencana di Pandeglang sudah difasilitasi tahun 2019 sehingga tahun 2023 akan dilaksanakan pendampingan pemulihan sektor perumahan. Kemendikbudristek: APBN kami tidak memiliki alokasi untuk sarpras pendidikan. usulan menu dalam DAK kami ada rehab untuk ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang dan pembangunan ruang kelas baru (untuk jenjang SD dan SMP). jadi untuk Bappeda bisa diajukan melalui DAK Fisik
Usulan	35 - Provinsi Jawa Timur	0021 - Revitalisasi SMK (Pembangunan dan Pengembangan SMK, serta pengadaan alat latih dan infrastruktur) (Perpres 80/2019)	Ditolak	5	SMK	Pemprov Jatim - Untuk mencukupi tenaga terampil di industri lokal: 2 di Tuban dan Bojonegoro; 1 di trenggalek, 1 di Malang (KEK Singhasari); 1 di Sampang (eko lokal) - Lahan sudah siap - DED dan penyusunan masterplan di Trenggalek, Malang, dan Sampang masih berproses, sisanya sudah siap - SMK sudah ada, namun perlu ada penambahan fasilitas baru untuk memenuhi tuntutan kebutuhan industri - Menu DAK terbatas, sehingga kurang mengakomodir kebutuhan Dit. APK Bappenas - Bisa dialokasikan melalui DAK - Intervensi SMK di Jatim sudah sangat besar, tinggal penyusunan lokus - RO 1: SMK Pusat Unggulan Kemendikbud: - Permintaan alat latih dan fasilitas baru - Tahun 2023 tidak dialokasikan dalam Renja - Dalam pengusulan DAK Fisik perlu memperhatikan Dapodik - SMK yang diajukan harus belum pernah mendapat intervensi DAK fisik - Ada beberapa SMPK PK dengan bidang pertambangan, yang diintervensi pengadaan alat (tidak ada pembangunan baru) Kesimpulan: Ditolak dengan catatan diusulkan melalui mekanisme perencanaan DAK dengan mempertimbangkan arah kebijakan, bidang, menu dan lokpri DAK Tahun 2023
ProP		02 - Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat				
Usulan	15 - Provinsi Jambi	0023 - Penambahan Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sekolah dan KIP Kuliah	Diakomodir	120000	Siswa dan mahasiswa	Kesepakatan: Diakomodir Catatan: peningkatan volume 1-3% Kemendikbud: 1. Angka 120.000 meningkat ekstrem dibanding tahun sebelumnya 2. Kinerja pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Jambi masih mendapat urutan 29 dari 34 prov 3. Berapapun yang masuk dalam DTKS dapat disalurkan asalkan datanya lengkap dan valid 4. Terdapat PIP disdakmen dan PIP kuliah. KIP kuliah dibagi pada PTN dan LL Dikti. LL Dikti akan memberikan kuota pada masing-masing PTS. Kuota diberikan berdasarkan dan melalui 2 institusi tsb. 5. Persyaratan mendapatkan KIP Kuliah adalah memiliki KIP SMA, dan dipastikan terdata dalam DTKS. 6. Wilayah dengan kinerja pelaksana tinggi menjadi prioritas, penambahan untuk Jambi kemungkinan 1-3%. Bappenas: 1. Alokasi menyesuaikan verifikasi dan validasi calon penerima
Usulan	91 - Provinsi Papua Barat	01 - Program Paud dan wajib belajar 12 tahun	Tidak Terbahas	5000	orang	
PP		07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing				
KP		01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri				
ProP		01 - Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				

LEVEL	PROVINSI	USULAN	APPROVAL	VOL	SATUAN	CATATAN_APPROVAL
Usulan	12 - Provinsi Sumatera Utara	0009 - Pembangunan Perguruan Tinggi/ Akademi Pariwisata dan Industri	Ditolak	2	Perguruan Tinggi	Ditolak sesuai pembahasan dalam forum Rakortekrenbang.
Usulan	81 - Provinsi Maluku	0014 - Pengembangan Pendidikan Vokasi : Pengembangan Teaching Factory dan Kurikulum Link and Match Iduka	Diakomodir	8	sekolah	Diakomodir, dengan catatan menyesuaikan pemenuhan persyaratan SMK PK Dit APK Bappenas - untuk SMK PK merupakan program unggulan kemdikbud dalam pengembangan SKM secara komperhensif - Untuk teaching factory, masuk dalam kegiatan SMK PK - SMK PK berdasarkan proposal based ke Kemdikbud - hal yang diperhatikan, di tahun 2022 sudah ada 9 SMK yg ditetapkan SMK PK, perlu evaluasi dan dipastikan bukan SMK yang sama - perlu diidentifikasi kembali kebutuhan tiap SMK PK, jika kebutuhan lebih banyak fisik, dapat diusulkan melalui DAK terlebih dahulu - jika kebutuhan untuk peningkatan SDM dll dapat diusulkan melalui SMK PK Biroren Kemdikbud - Tahun 2023, masih ada RO SMK PK dan masuk dalam RO Prioritas Nasional - belum dapat menyampaikan lokasi dan anggaran secara rinci karena masih dlm pembahasan pagu indikatif Dit SMK Kemdikbud - Penetapan SMK PK melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yg telah ditentukan
ProP		02 - Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
Usulan	21 - Provinsi Kepulauan Riau	0002 - Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	Tidak Terbahas	3	sekolah	
Usulan	21 - Provinsi Kepulauan Riau	0004 - Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi	Diakomodir	10961	siswa	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang
Usulan	81 - Provinsi Maluku	0016 - Pengembangan SMK Pusat Keunggulan	Diakomodir	8	Paket	Diakomodir , dengan catatan menyesuaikan pemenuhan persyaratan SMK PK Dit APK Bappenas - untuk SMK PK merupakan program unggulan kemdikbud dalam pengembangan SKM secara komperhensif - Untuk teaching factory, masuk dalam kegiatan SMK PK - SMK PK berdasarkan proposal based ke Kemdikbud - hal yang diperhatikan, di tahun 2022 sudah ada 9 SMK yg ditetapkan SMK PK, perlu evaluasi dan dipastikan bukan SMK yang sama - perlu diidentifikasi kembali kebutuhan tiap SMK PK, jika kebutuhan lebih banyak fisik, dapat diusulkan melalui DAK terlebih dahulu - jika kebutuhan untuk peningkatan SDM dll dapat diusulkan melalui SMK PK Biroren Kemdikbud - Tahun 2023, masih ada RO SMK PK dan masuk dalam RO Prioritas Nasional - belum dapat menyampaikan lokasi dan anggaran secara rinci karena masih dlm pembahasan pagu indikatif Dit SMK Kemdikbud - Penetapan SMK PK melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yg telah ditentukan
Usulan	65 - Provinsi Kalimantan Utara	0018 - Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah menengah Kejuruan penguatan SMK pusat Keunggulan (SMK PK)	Diakomodir	32	SMK	Kemendikbud: - Saat ini belum dapat menginformasikan target dan anggaran untuk SMK PK, karena masih dalam proses TM Pagu Indikatif Kemendikbud TA 2023. - SMK PK berdasarkan proposal-based dan seleksi sesuai syaratnya. Untuk target secara nasional belum ada karena anggaran sesuai seleksi dengan terpilih. Kementerian PPN/Bappenas (Dit. APK) :

LEVEL	PROVINSI	USULAN	APPROVAL	VOL	SATUAN	CATATAN_APPROVAL
						<ul style="list-style-type: none"> - RO dalam RKP 2024 masih tersedia dengan lebih kurang target 1000 lembaga. - Pemerintah Daerah dapat menyiapkan proposal tersebut. - Diharapkan dengan adanya SMK PK ini dapat mendukung kawasan industri di Kaltara. <p>Pemerintah Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappedalitbang Kaltara: <ul style="list-style-type: none"> - Diusulkan 32 sekolah dapat mendukung SDM yang siap bekerja. <p>Diakomodir dengan catatan bahwa volume disesuaikan proposal yang memenuhi kriteria dan disesuaikan dengan anggaran TM Kemendikub TA 2023.</p>
Usulan	63 - Provinsi Kalimantan Selatan	0019 - Pengembangan SMK berbasis industri 4.0	Diakomodir	13	unit	<p>Kementerian PPN/Bappenas (Dit. APK):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Kalsel, perlu diprioritaskan di KI Batulicin - RO dan anggaran tersedia - Proposal-based, sehingga Pemda diharapkan terus mengawal <p>Kemendikbudristek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betul adanya RO pengembangan SMK 4.0. Namun karena proposal-based akan ada seleksi - Target sekitar 20 SMK seluruh Indonesia <p>Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Kalsel <ul style="list-style-type: none"> - Pemda akan koordinasi dengan OPD terkait proposal - Lahan sudah siap di KI Jorong maupun KI Batulicin untuk dibangun SMK <p>Hasil: Diakomodir, dengan catatan harus ada persyaratan proposal yang harus dipenuhi Pemda</p>
Usulan	12 - Provinsi Sumatera Utara	0023 - Revitalisasi SMK serta peningkatan sarana prasarana SMK seperti Ruang Praktik siswa dan alat praktik siswa	Ditolak	40	unit SMK	<p>Ditolak dengan catatan diusulkan melalui mekanisme perencanaan DAK dengan mempertimbangkan arah kebijakan bidang, menu, dan lokpri DAK Tahun 2023.</p> <p>Kemendikbud :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu diperhatikan Dapodik karena menjadi acuan penilaian DAK Fisik di daerah - Satuan Pendidikan yang mendapatkan bantuan DAK yang belum pernah mendapatkan bantuan <p>Dit. APK, Bappenas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepakat, dengan diarahkan untuk melalui skema DAK. <p>Bappeda Sumut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan revitalisasi SMK berupa bantuan alat praktik SMK <p>Disdik Sumut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar dapat ditambahkan bantuan ke SMK PK untuk lokpri provinsi Sumatera Utara.
Usulan	19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0030 - Pendidikan Vokasi Menuju Industri 4.0 Pendidikan Vokasi Menuju Industri 4.0 (Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung Timur)	Diakomodir	5	unit	<p>Kesepakatan: Diakomodir</p> <p>Catatan: Mengajukan proposal dan melalui seleksi</p> <p>Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 5 lokasi (kab/kota) yang diusulkan 2. DED tahun 2021 3. Usulan pengembangan gedung (eksisting sudah ada) <p>Kemendikbudristek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat RO terkait pengembangan SMK pusat keunggulan. Usulan diajukan melalui prosedur proposal based. 2. Diusulkan untuk diakomodir melalui proposal based <p>Bappenas Dit APK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di tahun 2023 terdapat RO untuk pengembangan kompetensi dan keahlian, ada fokus dalam 5 sektor untuk mendukung KEK dan KI. Usulan diajukan proposal based
Usulan	94 - Provinsi Papua	07 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Ditolak	29	unit	<p>Ditolak dengan catatan diusulkan melalui mekanisme perencanaan DAK dengan mempertimbangkan arah kebijakan, bidang, menu dan lokpri DAK Tahun 2023, serta Pemda perlu mengupdate data Dapodik</p> <p>Bappeda Papua:</p>

LEVEL	PROVINSI	USULAN	APPROVAL	VOL	SATUAN	CATATAN_APPROVAL
						<p>1. Fokus kegiatan: Penyediaan alat praktik siswa</p> <p>Biroren, Kemendikbud:</p> <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana tidak dialokasikan dalam anggaran 2023, namun dapat diusulkan melalui DAK Fisik dengan opsi menu peralatan praktek siswa, rehab ruang praktik kejuruan, rehab ruang lab fisika, rehab ruang lab komputer, rehab ruang guru, pembangunan ruang praktek siswa dan perabotannya, pengadaan ruang praktek utama dll</p> <p>2. Dalam pengusulan DAK fisik diharapkan Dapodik sudah terupdate dengan kondisi saat ini karena dijadikan acuan oleh Kemendikbud</p> <p>Dit. APK Bappenas:</p> <p>1. Usulan diarahkan melalui mekanisme DAK (Menu sudah tersedia terkait peralatan praktek siswa)</p> <p>2. Papua menjadi prioritas lokpri yang cukup banyak, sehingga dapat dioptimalkan pengusulannya melalui mekanisme DAK</p> <p>3. Namun untuk Pembangunan SMK harus memenuhi persyaratan ketersediaan lahan, SDM</p>
ProP		03 - Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi				
Usulan	21 - Provinsi Kepulauan Riau	0005 - Jumlah Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kopetensinya	Diakomodir	283	guru	Diakomodir sesuai pembahasan dalam rakortekrenbang
Usulan	18 - Provinsi Lampung	0013 - Pembinaan sekolah menengah kejuruan	Diakomodir	100	orang	<p>Kesepakatan: Diakomodir</p> <p>Catatan:</p> <p>1. RO disesuaikan yang terkait dengan asesor guru</p> <p>2. usulan tetap diusulkan berdasarkan proses seleksi</p> <p>Bappeda:</p> <p>1. usulan: pembinaan SMK di Lampung. revitalisasi SMK merupakan agenda prioritas daerah dan kemendikbudristek ikut membantu untuk mencapai agenda utama daerah.</p> <p>Disdibud Lampung:</p> <p>1. usulan: guru yang diangkat menjadi asesor</p> <p>2. target: 20 persen dari jumlah sekolah, yaitu 1000 asesor.</p> <p>3. tahun 2022 sudah disiapkan anggaran untuk membina guru yang akan habis sertifikasinya (20 orang)</p> <p>Kemendikbud:</p> <p>1. Diusulkan revisi kinerja sesuai dengan RO</p> <p>2. Terkait asesor: kegiatan ini menjadi prioritas ditjen, yaitu guru yang dilatih menjadi asesor</p> <p>3. tidak hanya penguatan kompetensi guru yang menjadi asesor, namun juga sekolah yang ditingkatkan (upskilling dan reskilling)</p> <p>Dit. APK:</p> <p>1. Belum ada intervensi khusus untuk diklat asesor.</p> <p>2. Banyak kegiatan di kemendikbud yang bersifat proposal based</p> <p>3. usulan tetap diusulkan berdasarkan proses seleksi</p> <p>4. RO masih belum tepat</p>
Usulan	12 - Provinsi Sumatera Utara	0022 - Pelatihan kapasitas/ kompetensi guru SMK Assesor Teknis dan LSP P-1 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan)	Diakomodir	400	orang	<p>Diakomodir dengan catatan perlu pemenuhan proposal based kepada Kemendikbud.</p> <p>Kemendikbud:</p> <p>- Mengalokasikan di renja tahun 2023, RO masuk dalam kategori PN</p> <p>- Belum dapat memastikan alokasi dan target karena masih dalam pembahasan</p> <p>Dit. APK, Bappenas:</p> <p>- Usulan dapat diakomodir dengan catatan dapat diusulkan melalui Proposal yang disampaikan ke Kemendikbud.</p>
PN		04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
PP		02 - Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia				
KP		02 - Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat				
ProP		03 - Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat				

LEVEL	PROVINSI	USULAN	APPROVAL	VOL	SATUAN	CATATAN_APPROVAL
Usulan	64 - Provinsi Kalimantan Timur	0019 - Program = Pengeloaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sub Program = Register Cagar Budaya	Diakomodir	50	Cagar Budaya	Kemendikbudristek - Merupakan kewenangan provinsi, sehingga dapat dianggarkan melalui APBD maupun sharing cost (sertifikasi PACB dengan BPCB Kaltim) Pemerintah Daerah (Disdikbud Kaltim) - Register ke arah penetapan. Sudah menerima surat 22 Maret tentang sharing anggaran. Pemda sudah mengajukan nama Diakomodir , dengan catatan pembentukan tim PACB melalui sharing anggaran
057 - PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA						
PN		04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
PP		04 - Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter				
KP		01 - Peningkatan Budaya Literasi				
ProP		01 - Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca				
Usulan	64 - Provinsi Kalimantan Timur	0020 - Peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Diakomodir	25	Per-pustaka-an	Perpusnas: - Dapat diakomodir melalui akreditasi perpustakaan dan sertifikasi profesi pustakawan, serta diklat tenaga perpustakaan - Khusus pelayananan perpustakaan daerah khususnya perpustakaan umum di Kab/Kota menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Diakomodir mengikuti anggaran
PN		04 - Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi				
PP		01 - Pengembangan Mitra Perpustakaan (Library Supporter)				
Usulan	12 - Provinsi Sumatera Utara	0012 - Peningkatan Kapasitas Pustakawan dan Arsiparis bersertifikasi	Tidak Terbahas	200	orang	

**MATRIKS
PEMBANGUNAN
RKP 2024**

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

7. Kementerian Agama